

LAPORAN KINERJA 2021

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I BANDUNG

LAPORAN KINERJA 2021

**Kementerian Komunikasi Dan
Informatika**

**Direktorat Jenderal
Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika**

**Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas I BANDUNG**

Jl. Pacuan Kuda No.146, Arcamanik, Bandung - 20371

Telp. : (022) 7278484, 7214464 Fax. : (022) - 7278382

E-mail. : upt_bandung@postel.go.id Website. : www.postel.go.id



WILUJENG SUMPING

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pandemi Covid-19 pada tahun 2021 telah mendorong kebutuhan transformasi digital nasional menjadi semakin krusial. Kebutuhan koneksi internet dan komunikasi nirkabel yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Situasi ini mendesak Kemenkominfo untuk secara optimal akan melakukan percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan digitalisasi melalui pemanfaatan frekuensi radio yang berdaya guna. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya frekuensi radio yang mumpuni.

Indonesia, baik secara nasional maupun regional, telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan sedang bertransformasi dari sebuah negara berkembang yang berpendapatan menengah ke atas menuju negara dengan ekonomi yang inklusif, modern, dan disegani di panggung internasional.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan spektrum frekuensi radio tersebut, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung hadir untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan spektrum frekuensi radio di Jawa Barat yang bersifat mandiri di bawah unit eselon I Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung tahun 2021 terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 15 (lima belas) indikator. Pada tahun 2021, capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung dari sejumlah indikator kinerja tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (5)
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi.	1. Persentase Pengukuran Stasiun Radio Dan Televisi Siaran Di Wilayah Kerja.	50,00%	76,80%	153,60%
		2. Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik.	80,00%	90,9%	113,63%
		3. Persentase Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT.	100,00%	100,00%	100,00%
		4. Persentase Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi radio	100,00%	100,00%	100,00%
		5. Persentase Pelaksanaan sosialisasi dan atau SRC/LRC dan jumlah ISR Maritim Nelayan.	90,00%	73%	81,11%
		6. Pelaksanaan Inspeksi Stasiun Radio Terkait Validasi Data ISR.	90,00%	100,00%	111,11%
		7. Persentase Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kab/Kota	80,00%	100,00%	125,00%
		8. Persentase Jumlah ISR yang Termonitor	70,00%	100,00%	142,86%
		9. Persentase ISR Hasil monitoring yang Teridentifikasi.	90,00%	99,00%	110,00%
		10. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur UPT	80,00%	80,00%	100,00%
		11. Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	97,00%	100%	103,09%
		12. Persentase Penertiban Spektrum Frekuensi Radio	70,00%	97,20%	138,86%
		13. Monitoring Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00%
		14. Penertiban Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif.	1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score).	86,00%	88,53%	102,94%

Sasaran Kegiatan Pertama: “**Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penerbitan serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi.**” terdiri dari 14 (empat belas) Indikator Kinerja, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Persentase (%) Pengukuran Stasiun Radio dan Televisi Siaran di Wilayah Kerja yaitu:

Pada tahun anggaran 2021, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung memiliki target pelaksanaan kegiatan pengukuran parameter teknis frekuensi radio di wilayah Jawa Barat sebanyak 18 (delapan belas) kegiatan dengan target pada perjanjian kinerja tahun 2021 sebesar 50% dari 375 ISR yang terdaftar pada data SIMS. Sampai dengan bulan Desember 2021 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melaksanakan pengukuran parameter teknis dengan capaian sebesar 76,38% yaitu 186 stasiun Radio Siaran FM dan 102 stasiun televisi siaran analog dan digital dengan total 288 ISR dari 362 ISR di wilayah Jawa Barat yang menjadi kewenangan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung.

2. Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik yaitu:

Pada tahun anggaran 2021, Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio memiliki target realisasi sebesar 80 persen. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melaksanakan 2 (dua) kegiatan sosialisasi yakni Sosialisasi Perizinan Radio Komunikasi dalam Mendukung Pariwisata dan Bimbingan Teknis Ujian Negara Amatir Radio di Kab. Bandung Barat dengan jumlah peserta 125 orang dari yang berasal dari 20 kab/kota di wilayah Jawa Barat capaian Indikator hingga akhir Desember 2021 sebesar 90.9% sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 113,63%.

3. Persentase Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT yaitu:

Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan CAT UNAR memiliki target realisasi sebesar 100 persen. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat

diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2021 adalah sebesar 100%, sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%. UNAR Reguler yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan 1 (satu) kali di Hotel Pantai Timur kabupaten Pangandaran. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan metode CAT dan memenuhi prosedur kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Dari total peserta siaga sebanyak 387 peserta, lulus 283 peserta dan tidak lulus 104 peserta. Peserta penggalang 27 peserta, lulus 21 peserta dan tidak lulus 6 peserta. Peserta penegak 5 peserta, lulus 4 peserta dan tidak lulus 1 peserta. Dari data tersebut, tingkat kelulusan untuk UNAR pada tahun 2021 sebesar 73,5%.

4. *Persentase Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi radio yaitu:*

Indikator Kinerja Persentase (%) Penanganan Tagihan BHP Frekuensi Radio memiliki target realisasi sebesar 100 persen. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2021 sebesar 100% sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%. Sepanjang 2021 telah didistribusikan sejumlah 976 tagihan yang diterbitkan

5. *Persentase Pelaksanaan sosialisasi dan atau SRC/LRC dan jumlah ISR Maritim Nelayan. yaitu:*

Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan sosialisasi dan atau SRC/LRC dan jumlah ISR Maritim Nelayan memiliki target realisasi sebesar 90%. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2021 telah dilaksanakan 8x MOTS dengan peserta sebanyak 240 orang dan ISR sebanyak 1 ISR sehingga persentase pelaksanaan sebesar 73% dan target adalah 90% sehingga persentase kinerja mencapai 81,11%

6. *Pelaksanaan Inspeksi Stasiun Radio Terkait Validasi Data ISR yaitu:*

Pada perjanjian kinerja tahun 2021 Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung ditargetkan 90% kesesuaian data hasil inspeksi dengan

data ISR dari 1656 (seribu enam ratus lima puluh enam) data sample ISR Microwave Link yang ditetapkan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI. Jumlah target kegiatan inspeksi tahun 2021 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung adalah 10 (Sepuluh) kegiatan di wilayah Jawa Barat. Sampai dengan Desember 2021 data yang dapat diinspeksi adalah 1656 frekuensi link yang telah ditindaklanjuti adalah 892 Microwave Link sesuai ISR, 173 Microwave Link tidak sesuai ISR, 217 Microwave Link tidak aktif dan ditindaklanjuti pengurusan izin/penggudangan 374 Microwave Link. Sehingga dari data tersebut pelaksanaan dan kinerja sebesar 100%.

7. Persentase Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kab/Kota yaitu:

Pada tahun anggaran 2021, realisasi pelaksanaan kegiatan observasi dan monitoring frekuensi radio tersebut adalah 24 (dua puluh empat) kegiatan dengan jumlah kabupaten/kota yang termonitor adalah 19 (sembilan belas) kabupaten/kota dari jumlah target kabupaten/kota termonitor sebanyak 18 (delapan belas) kabupaten/kota atau dengan kata lain capaian kinerjanya adalah 100% dari yang ditargetkan pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebesar 80%. Sehingga indikator kinerja sebesar 125%

8. Persentase Jumlah ISR yang Termonitor yaitu:

Selama tahun 2021, Dari 19 (sembilan belas) kabupaten/kota yang dilakukan monitoring telah termonitor 1204 (seribu dua ratus empat) ISR dari 1452 (seribu empat ratus lima puluh dua) ISR. Indikator Kinerja Persentase (%) Jumlah ISR yang Termonitor memiliki target realisasi sebesar 70%. sehingga persentase kinerja mencapai 142,86%

9. Persentase ISR Hasil monitoring yang Teridentifikasi yaitu:

Selama tahun 2021, Dari 19 (sembilan belas) kabupaten/kota yang dilakukan monitoring telah termonitor 5.343 ISR dan teridentifikasi 5.341ISR sehingga capaian pelaksanaan kegiatan sebesar 99%. Indikator Kinerja Persentase (%) Jumlah ISR yang Termonitor memiliki target realisasi sebesar 90%. sehingga persentase kinerja mencapai 110%

10. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur UPT yaitu:

Indikator Kinerja Persentase (%) Penanganan perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT memiliki target realisasi sebesar 80%. Berdasarkan data capaian diketahui bahwa nilai dari realisasi sampai akhir Desember 2021 sebesar 79.77%, sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%. Dengan total perangkat yang dimiliki sebanyak 358 (tiga ratus lima puluh delapan) unit yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan, pada akhir tahun sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) unit dalam keadaan Baik, sedangkan 66 (enam puluh enam) unit dalam keadaan Rusak

11. Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio yaitu:

Pada tahun anggaran 2021, Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung terdapat 32 (tiga puluh dua) kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio di wilayah Jawa Barat dengan target pada perjanjian kinerja 100,00% aduan/klaim yang diselesaikan, upaya penanganan gangguan frekuensi radio telah dilaksanakan 32 (tiga puluh dua aduan gangguan di tahun 2021 dengan penyelesaian aduan/klaim gangguan adalah 100% terselesaikan atau tidak terjadi lagi interference pada aduan yang sama (clear).

12. Persentase Penertiban Spektrum Frekuensi Radio yaitu:

Pada tahun anggaran 2021 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas I Bandung dengan target 70% kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 (tujuh) kali dan tindak lanjut hasil penertiban 3 (tiga) kali di wilayah Jawa Barat. Selama tahun 2021, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melaksanakan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio dan tindak lanjut penertiban sebanyak 10 (sepuluh) kali kegiatan dengan hasil pengguna frekuensi ilegal sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) frekuensi radio ilegal. Dari 73 (tujuh puluh tiga) frekuensi radio ilegal tersebut 45 (empat puluh lima) off air dan 26 (dua puluh enam) mengurus ISR. Sehingga

tindak lanjut atas penertiban tersebut mencapai 97,20%. sehingga persentase kinerja mencapai 138,86%

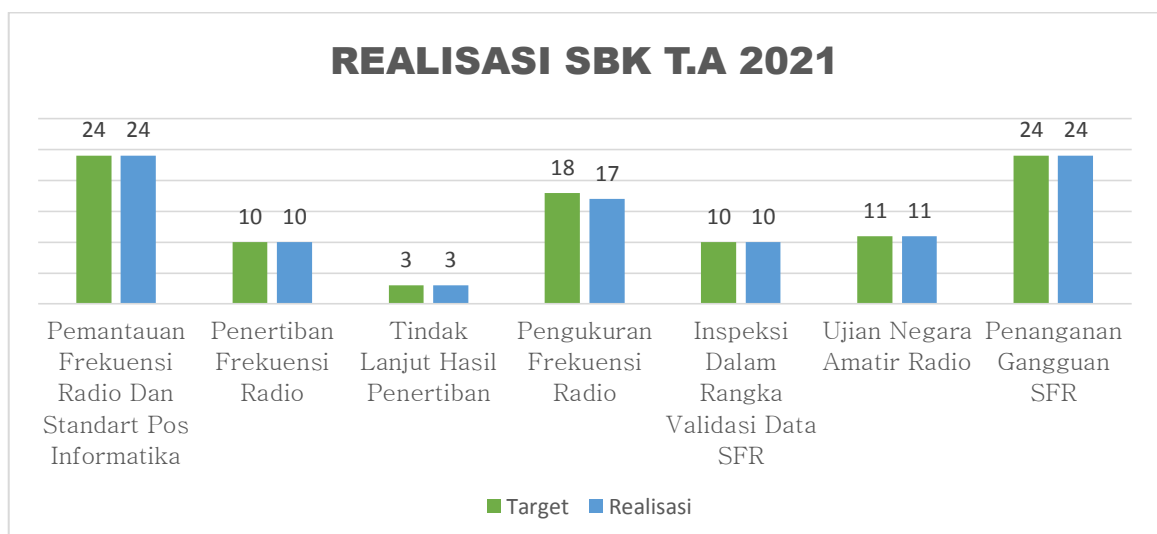
13. Monitoring Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi yaitu:

Pada tahun anggaran 2021 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas I Bandung memiliki target 3 (tiga) kali kegiatan monitoring. Selama tahun 2021, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melaksanakan 3 (tiga) kali kegiatan monitoring yang dilakukan di Kota Bandung, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Ciamis sehingga persentase kinerja mencapai 100%

14. Penertiban Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi yaitu:

Pada tahun anggaran 2021 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas I Bandung memiliki target 3 (tiga) kali kegiatan Penertiban Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi. Selama tahun 2021, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melaksanakan 3 (tiga) kali kegiatan Penertiban Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi. yang dilakukan di Kota Bandung, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Ciamis sehingga persentase kinerja mencapai 100%

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun 2021 terhadap indikator kinerja Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT yang terbagi ke dalam kegiatan pemantauan, penertiban, pengukuran, inspeksi, dan gangguan penggunaan frekuensi radio dengan gambaran sebagai berikut:



Sasaran Kegiatan Kedua: **“Terwujudnya tata kelola UPT Monitor spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif”** terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score).

Pada tahun 2021 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas I Bandung capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggarannya adalah sebesar 88,53%. Skor tersebut telah melebihi target dalam indikator perjanjian kinerja Ditjen SDPPI tahun 2021.



Zainuddin Kalla

Kepala Balmon SFR Kelas I Bandung

KATA PENGANTAR

*Assalaamu'alaikum Wa Rahmatullahi
Wa Barokaatuh*

Allhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat-Nya dan kekuatan-Nya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah menyelesaikan program kegiatan tahun anggaran 2021 serta dapat menyelesaikan penyusunan Buku Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021 sebagai informasi mengenai pelaksanaan program kerja dan anggaran selama periode tahun anggaran 2021.

Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung Tahun 2021 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik sebagai bahan masukan dan koreksi kegiatan tahun berikutnya, sehingga

dapat membantu penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja secara tepat guna dan tepat sasaran. Dokumen ini merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas, efisiensi, dan produktifitas instansi.

LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2021 dan dapat memberikan gambaran umum mengenai capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung selama periode tahun anggaran 2021. Semoga LAKIN ini dapat bermanfaat, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullahi
Wa Barokaatuh.*

Bandung, Januari 2022
Kepala Balai,

ttd

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	
B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	
C. Potensi Dan Permasalahan Strategis	
D. Sistematika Pelaporan	
Bab II Perjanjian Kinerja	
A. Rencana Strategis Tahun 2019-2024	
B. Rencana Program	
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
Bab III Laporan Kinerja	
A. Capaian Kerja Organisasi	
B. Penatausahaan Anggaran dan Kerumahtanggaan	
C. Kinerja Lainnya	
Bab IV Penutup	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan yang sangat pesat di sektor telekomunikasi tidak terlepas dari peran Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Direktorat Jenderal SDPPI). Sebuah Direktorat yang merupakan salah satu unit kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebagai organisasi yang mengelola regulasi, maka Direktorat Jenderal SDPPI bertugas menentukan norma, standar, kriteria yang harus dipatuhi oleh perusahaan atau institusi pengelola layanan di bidang telekomunikasi, pos, dan informatika. Regulasi-regulasi tersebut juga berlaku bagi masyarakat secara umum dan para penyelenggara bidang telekomunikasi khususnya.

Agar regulasi tersebut dapat diaplikasikan, maka aspek penyadaran masyarakat, pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum harus dilakukan dan ditegakan. Sedangkan sebagai organisasi pengelola layanan publik, Direktorat Jenderal SDPPI harus memberikan layanan yang sesuai dengan ekspektasi dan preferensi masyarakat pada umumnya dan para pemangku kepentingan pada khususnya. Untuk itu, upaya-upaya perbaikan berkelanjutan untuk mewujudkan pelayanan yang sempurna, profesional, dan berintegritas harus terus dilakukan secara terencana, sistematis, dan terukur.

Sektor telekomunikasi merupakan salah satu andalan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika berkontribusi besar terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang telah memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pendapatan negara bukan pajak dari Sektor Telekomunikasi menjadikan

Sektor Telekomunikasi menjadi sumber pendapatan negara bukan pajak nomer dua setelah minyak dan gas. Kedepan, upaya untuk mewujudkan industri komunikasi dan informatika nasional yang memiliki daya saing tinggi dan ramah lingkungan terus diupayakan dengan menjaga kepatuhan terhadap tata kelola pemanfaatan spektrum frekuensi dan penggunaan perangkat pos dan informatika. Dengan demikian cita-cita menuju Indonesia yang informatif yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses, memanfaatkan dan menyebarkan informasi serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi akan dapat terwujud.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung sebagai Unit Pelaksana Teknis – Direktorat Jenderal SDPPI senantiasa mendukung program-program yang telah ditetapkan melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Jawa Barat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Program kerja Balai Monitor Bandung secara umum diarahkan untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder yang terkait melalui pengawasan dan pengendalian frekuensi di wilayah Jawa Barat.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung ini adalah untuk mengukur kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk

memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, diharapkan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung Tahun 2021 dan berkontribusi positif terhadap meningkatnya fungsi-fungsi pelayanan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada umumnya dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung sebagaimana diatur dalam Bab I dan Bab II Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2019. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program;
- 2) Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- 3) Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap pengguna spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- 4) Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;

- 5) Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio;
- 6) Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio
- 7) Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- 8) Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- 9) Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatatusahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.

2. Seksi Pemantauan dan Penertiban

Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.

3. Seksi Sarana dan Pelayanan

Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap

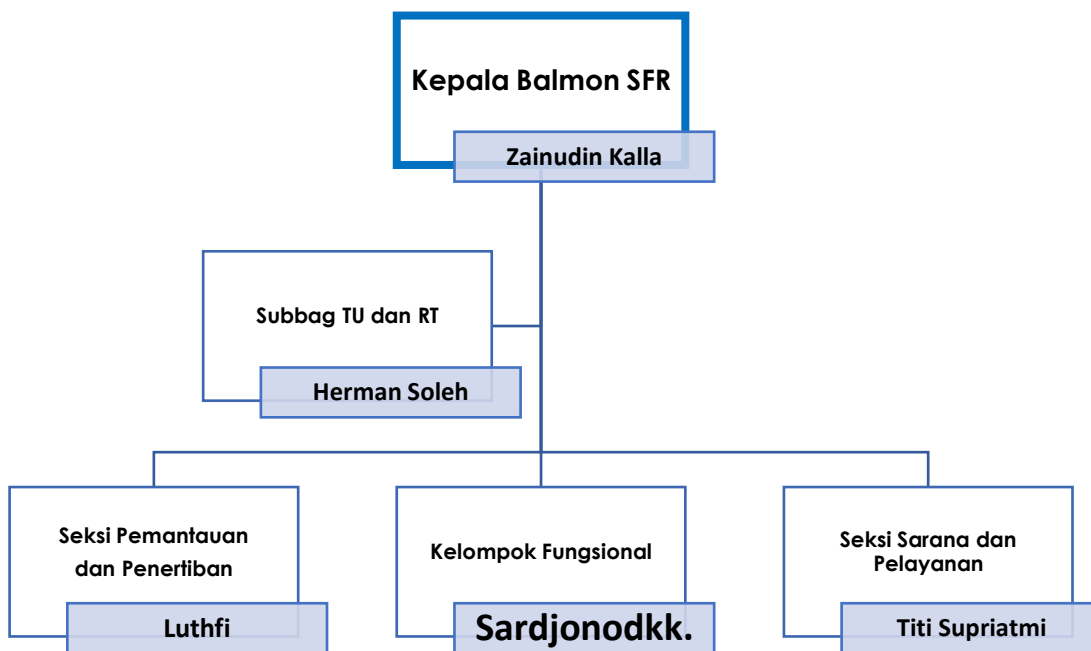
gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing masing sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung



C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS



Provinsi Jawa Barat dibentuk pertama kali tanggal 14 Agustus 1926 berdasarkan penetapan Pemerintah Hindia Belanda melalui *staatblad* 1924 Nomor: 378 tanggal 14 Agustus 1926, pada masa pra kemerdekaan dan pada tanggal 19 Agustus 1945 berdasarkan penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membagi kembali Daerah Negara Republik Indonesia menjadi delapan provinsi yang salah satunya Provinsi Jawa Barat. Pembentukan Provinsi Jawa barat ini kemudian ditetapkan kembali oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 1950. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2010 bahwa tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Barat. Secara administratif pemerintahan, wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan,

Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar serta terdiri dari 626 kecamatan, 641 kelurahan, dan 5.321 desa.

Provinsi Jawa Barat dengan luas 35.377,76 km² menurut Data SIAK Provinsi Jawa Barat didiami penduduk sebanyak 46.497.175 Juta Jiwa. Penduduk ini tersebar di 27 Kabupaten/Kota, 625 Kecamatan dan 5.899 Desa/Kelurahan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Bogor sebanyak 4.966.621 Jiwa (11,03 %), sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kota Banjar yaitu sebanyak 192.903 Jiwa (0,43 %). Jumlah penduduk di daerah penyangga Ibukota, yaitu di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok sebanyak 11.930.991 Jiwa atau 26% dari jumlah penduduk Jawa Barat. Dengan begitu dapat disimpulkan seperempat penduduk Jawa Barat tinggal di daerah penyangga Ibu Kota. Sedangkan jumlah penduduk yang tinggal di Bandung Raya (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi) sebanyak 8.670.501 Jiwa atau 18% dari total penduduk Jawa Barat, artinya hampir seperlima penduduk Jawa Barat tinggal di Bandung Raya/Ibu Kota Provinsi. Kalau di jumlahkan penduduk yang tinggal di penyangga Ibu Kota dan Bandung Raya, maka didapat jumlah penduduk di kedua daerah tersebut sebanyak 20.601.492 Jiwa atau 44% dari total jumlah penduduk Jawa Barat. Terlihat bahwa hampir separuh penduduk Jawa Barat tinggal di kedua daerah tersebut.

Hal tersebut, memberikan sebuah potensi yang besar terhadap peningkatan jumlah pengguna frekuensi radio di wilayah Jawa Barat. Akan tetapi, sekaligus merupakan tantangan dan hambatan yang perlu diantisipasi sejak

dini melalui penyediaan peralatan dan perlengkapan pendukung serta skill sumber daya manusia yang mumpuni secara kuantitas dan kualitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, wilayah tugas fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung berkurang menjadi 22 kabupaten/kota setelah Kabupaten/Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bogor menjadi wilayah kewenangan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung disamping melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap frekuensi radio juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi, sehubungan dengan hal tersebut Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi di lapangan dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Perangkat utama monitoring maupun perangkat pendukung SMFR yang ada pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung saat ini kurang memadai jika dibanding dengan jumlah wilayah yang harus dimonitor sehingga dibutuhkan pengadaan perangkat telekomunikasi yang baru terutama perangkat monitoring dan okupansi penggunaan frekuensi radio.
2. Sumber Daya Manusia ASN yang terdapat di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung yang memiliki kompetensi Teknis dan ahli dalam mengoperasikan perangkat cukup terbatas sehingga meskipun jumlah pengendali frekuensi cukup memadai tetapi skill yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan, maka perlu penambahan personil bidang teknis maupun peningkatan kemampuan (*Capacity Building*) melalui pelatihan teknis berkelanjutan.

3. Sumber Daya Manusia ASN yang terdapat di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung rata-rata berusia 40-58 tahun yang merupakan masa-masa usia pensiun, tentu hal ini akan menambah kapabilitas Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung di masa mendatang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian frekuensi radio.
4. Rendahnya anggaran biaya kegiatan pengembangan sumber daya manusia ASN terutama dalam penetrasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat dalam menyongsong era industri 4.0.
5. Regulasi penggunaan spektrum yang belum komprehensif yang belum menampung perkembangan teknologi maupun bisnis telekomunikasi di Indonesia, sehingga implementasi regulasi spektrum yang belum optimal, hal ini dibutuhkan sosialisasi yang intensif yang tepat sasaran dan tepat guna.
6. Banyaknya penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) yang membutuhkan intensitas pengawasan dan pengendalian tentunya hal tersebut dapat dilaksanakan jika perangkat dan SDM memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ruang lingkup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Laporan kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
4. Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya rencana strategis tahun 2019-2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal SDPPI, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian-pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan. Berdasarkan situasi dan mandat perundangan ini serta arah kebijakan pembangunan nasional dibidang konektivitas.

B. SASARAN PROGRAM

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya program Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada periode 2019-2024 yang telah disusun adalah, sasaran Program yang akan dicapai.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen SDPPI tahun 2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

No.	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan	1. Persentase Pengukuran Stasiun Radio Dan Televisi Siaran Di Wilayah Kerja.	50,00%
		2. Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik.	80,00%

Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi.	3. Persentase Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT.	100,00%
	4. Persentase Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi radio	100,00%
	5. Persentase Pelaksanaan sosialisasi dan atau SRC/LRC dan jumlah ISR Maritim Nelayan.	90,00%
	6. Pelaksanaan Inspeksi Stasiun Radio Terkait Validasi Data ISR.	90,00%
	7. Persentase Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kab/Kota	80,00%
	8. Persentase Jumlah ISR yang Termonitor	70,00%
	9. Persentase ISR Hasil monitoring yang Teridentifikasi.	90,00%
	10. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur UPT	80,00%
	11. Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	97,00%
	12. Persentase Penertiban Spektrum Frekuensi Radio	70,00%
	13. Monitoring Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi	3 Kegiatan
	14. Penertiban Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi	1 Kegiatan
2. Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif.	1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score).	86,00%

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 20.897.051.000,- (*dua puluh milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh satu ribu rupiah*). Total anggaran tersebut terdiri dari dua sumber dana yaitu: bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 8.181.956.000,- (*delapan*

miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan PNPB sebesar Rp. 9.159.979.000,- (sembilan miliar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).



BAB III LAPORAN KINERJA

Sebagai perwujudan kinerja, LAKIN 2021 memiliki fokus utama mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (5)
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi.	1. Persentase Pengukuran Stasiun Radio Dan Televisi Siaran Di Wilayah Kerja.	50,00%	76,80%	153,60%
		2. Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik.	80,00%	90,9%	113,63%
		3. Persentase Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT.	100,00%	100,00%	100,00%
		4. Persentase Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi radio	100,00%	100,00%	100,00%
		5. Persentase Pelaksanaan sosialisasi dan atau SRC/LRC dan jumlah ISR Maritim Nelayan.	90,00%	73%	81,11%
		6. Pelaksanaan Inspeksi Stasiun Radio Terkait Validasi Data ISR.	90,00%	100,00%	111,11%
		7. Persentase Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kab/Kota	80,00%	100,00%	125,00%
		8. Persentase Jumlah ISR yang Termonitor	70,00%	100,00%	142,86%

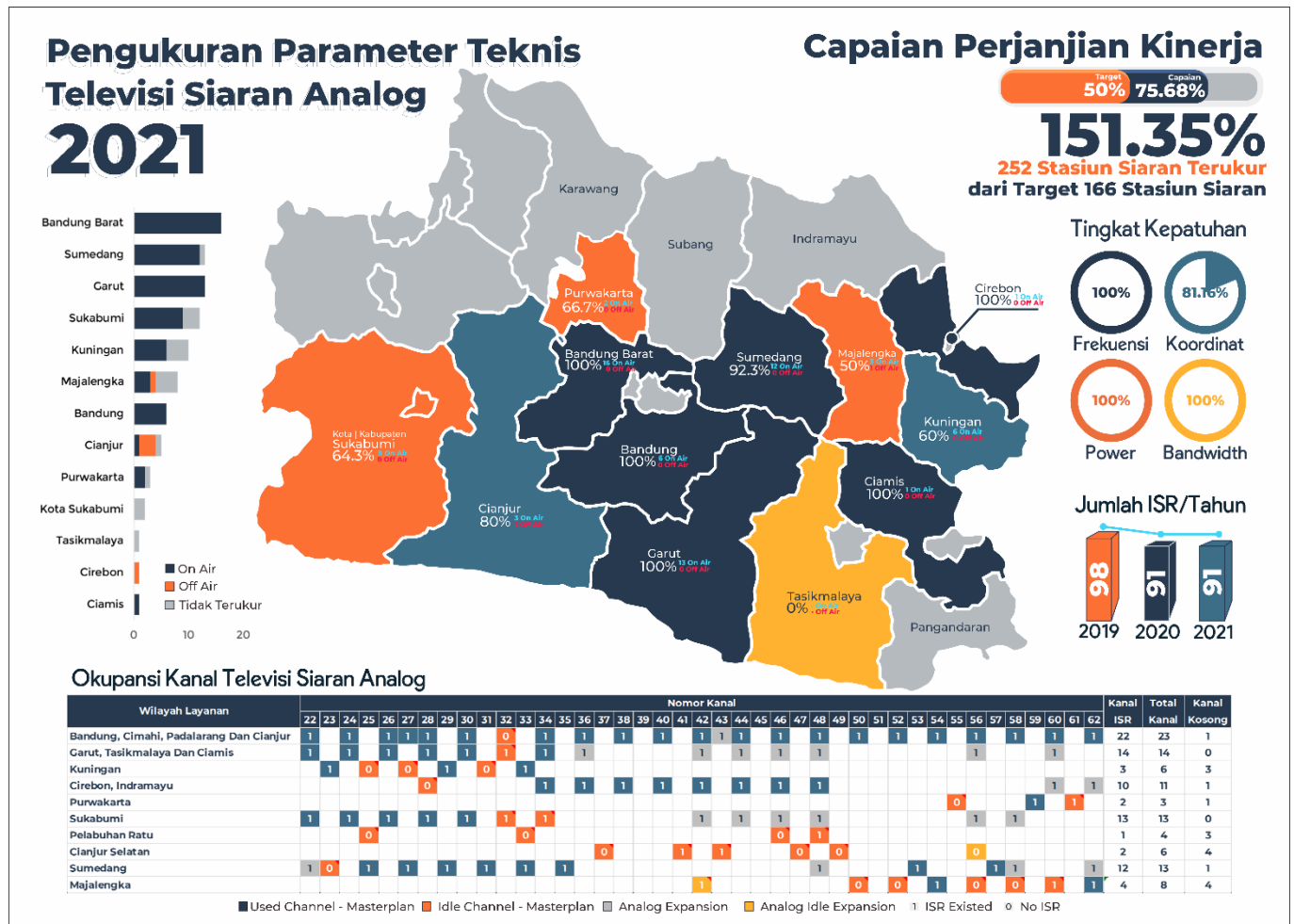
	9. Persentase ISR Hasil monitoring yang Teridentifikasi.	90,00%	99,00%	110,00%	
	10. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur UPT	80,00%	80,00%	100,00%	
	11. Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	97,00%	100%	103,09%	
	12. Persentase Penertiban Spektrum Frekuensi Radio	70,00%	97,20%	138,86%	
	13. Monitoring Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00%	
	14. Penertiban Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspektredrad yang bersih, efisien dan efektif.	1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score).	86,00%	88,53%	102,94%

SASARAN KEGIATAN 1: MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI, PENERTIBAN SERTA PELAYANAN PUBLIK SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

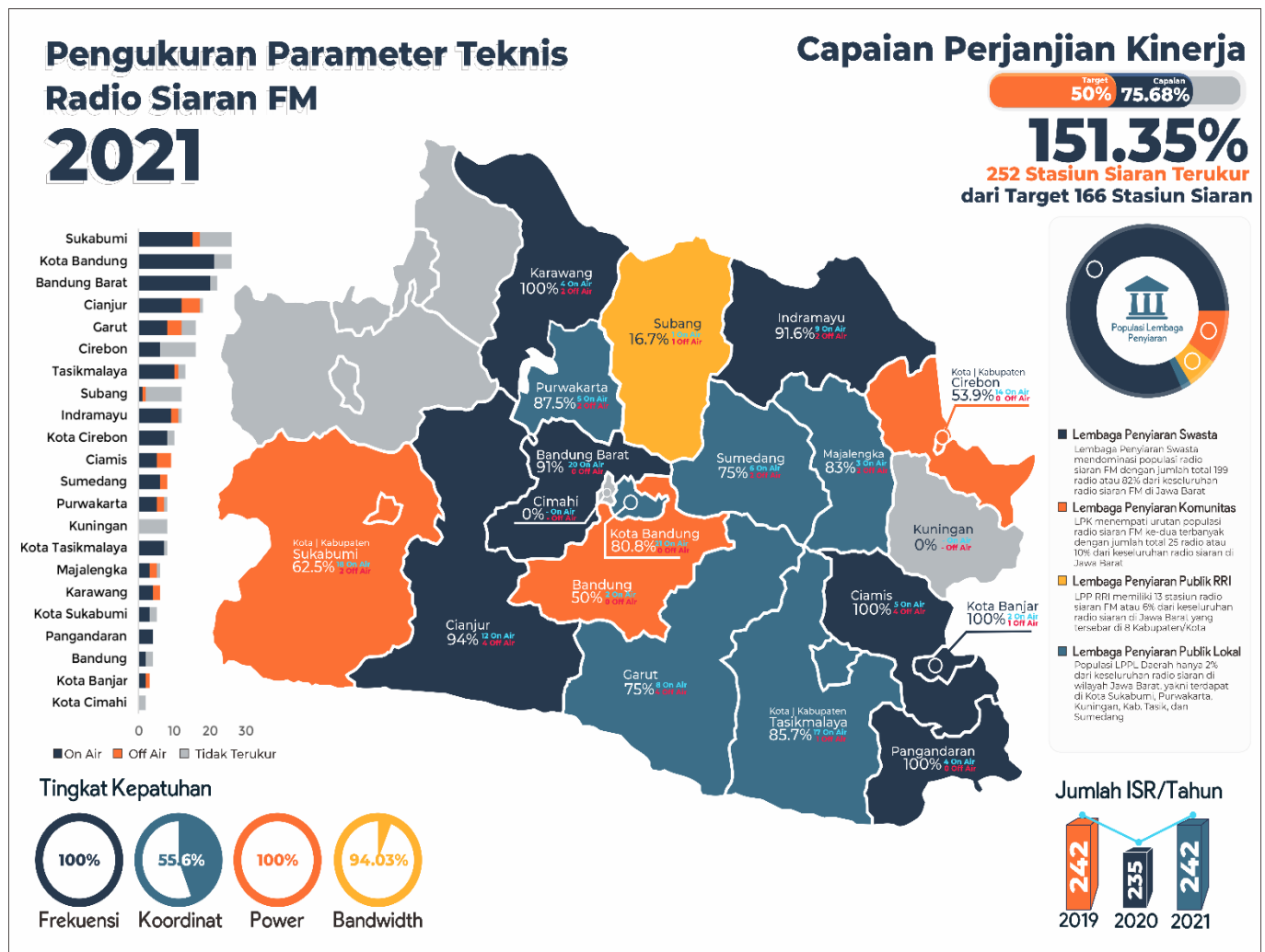
1. IK-1 Persentase (%) Pengukuran Stasiun Radio dan Televisi Siaran di Wilayah Kerja.

Pada tahun anggaran 2021, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung memiliki target pelaksanaan kegiatan pengukuran parameter teknis frekuensi radio di wilayah Jawa Barat sebanyak 18 (delapan belas) kegiatan dengan target pada perjanjian kinerja tahun 2021 sebesar 50% dari 375 ISR yang terdaftar pada data SIMS.. Sampai dengan bulan Desember 2021 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melaksanakan pengukuran parameter teknis dengan capaian sebesar 76,38% yaitu 186 stasiun Radio Siaran FM dan 102 stasiun televisi siaran analog dan digital dengan total

288 ISR dari 362 ISR. Data sebaran hasil pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:



Hasil pengukuran televisi (TV) tahun anggaran 2021 sebanyak 102 ISR televisi dengan persentase sebesar 81.6% (delapan puluh satu koma enam persen) dari populasi sebesar 125 (seratus dua puluh lima) ISR televisi berdasarkan data yang ada di SIMS tahun 2021



Hasil pengukuran radio siaran FM tahun anggaran 2021 sebanyak 186 ISR radio siaran dengan persentase sebesar 78.48% (tujuh puluh delapan koma empat puluh delapan persen) dari populasi sebesar 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) ISR radio siaran FM berdasarkan data yang ada di SIMS tahun 2021. Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2021, pada indikator “Persentase (%) Pengukuran Stasiun Radio dan Televisi Siaran di Wilayah Kerja” telah menyelesaikan 76,80% dari target 50%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai dan terget kinerja mencapai 153,60%

2. IK-2 Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik.

Pada tahun anggaran 2021, Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio memiliki target realisasi sebesar 80 persen. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melaksanakan 2 (dua) kegiatan sosialisasi yakni Sosialisasi Perizinan Radio Komunikasi dalam Mendukung Pariwisata dan Bimbingan Teknis Ujian Negara Amatir Radio di Kab. Bandung Barat dengan jumlah peserta 125 orang dari yang berasal dari 20 kab/kota di wilayah Jawa Barat capaian Indikator hingga akhir Desember 2021 sebesar 90,9% sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 113,63%.Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi.	Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio	80,00%	90,9%	113,63%



SOSIALISASI PERIZINAN FREKUENSI RADIO

3. IK-3 Persentase Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT.

Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan CAT UNAR memiliki target realisasi sebesar 100 persen. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2021 adalah sebesar 100%, sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

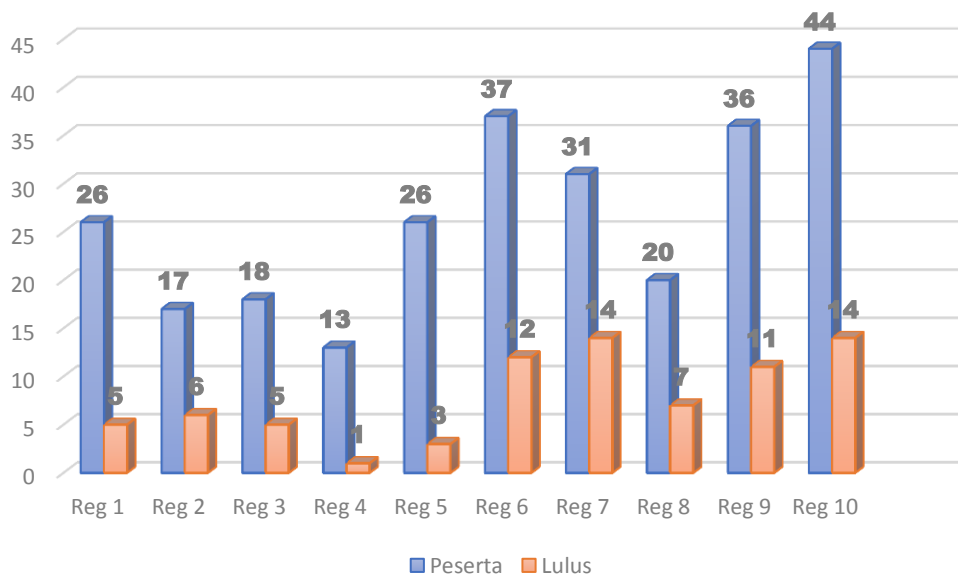
Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Pelaksanaan CAT UNAR	100%	100%	100%

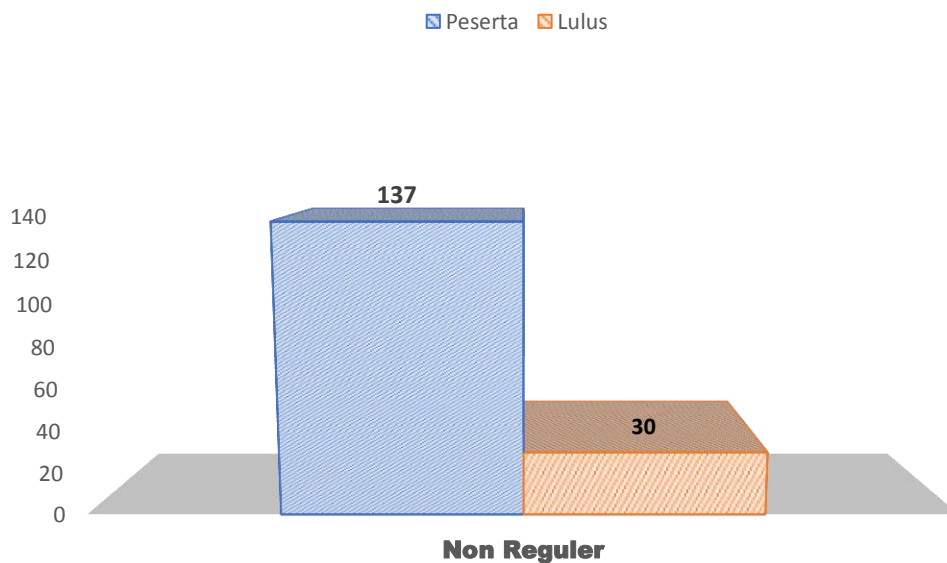
UNAR Reguler yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan 1 (satu) kali di Hotel Pantai Timur kabupaten Pangandaran. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan metode CAT dan memenuhi prosedur kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Dari total peserta siaga sebanyak 387 peserta, lulus 283 peserta dan tidak lulus 104 peserta. Peserta penggalang 27 peserta, lulus 21 peserta dan tidak lulus 6 peserta. Peserta penegak 5 peserta, lulus 4 peserta dan tidak lulus 1 peserta. Dari data tersebut,tingkat kelulusan untuk UNAR pada tahun 2021 sebesar 73,5%.

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat dikami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

Perbandingan Peserta dengan Tingkat Kelulusan pada unar reguler



PERBANDINGAN PESERTA DENGAN TINGKAT KELULUSAN PADA UNAR NON REGULER



Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2020, indikator "Persentase (%) Pelaksanaan CAT UNAR" telah dilaksanakan sesuai program kerja tahun anggaran 2021, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai 100%.



Kegiatan Ujian Negara Amatir Radio

4. IK-4 Persentase Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Piutang BHP

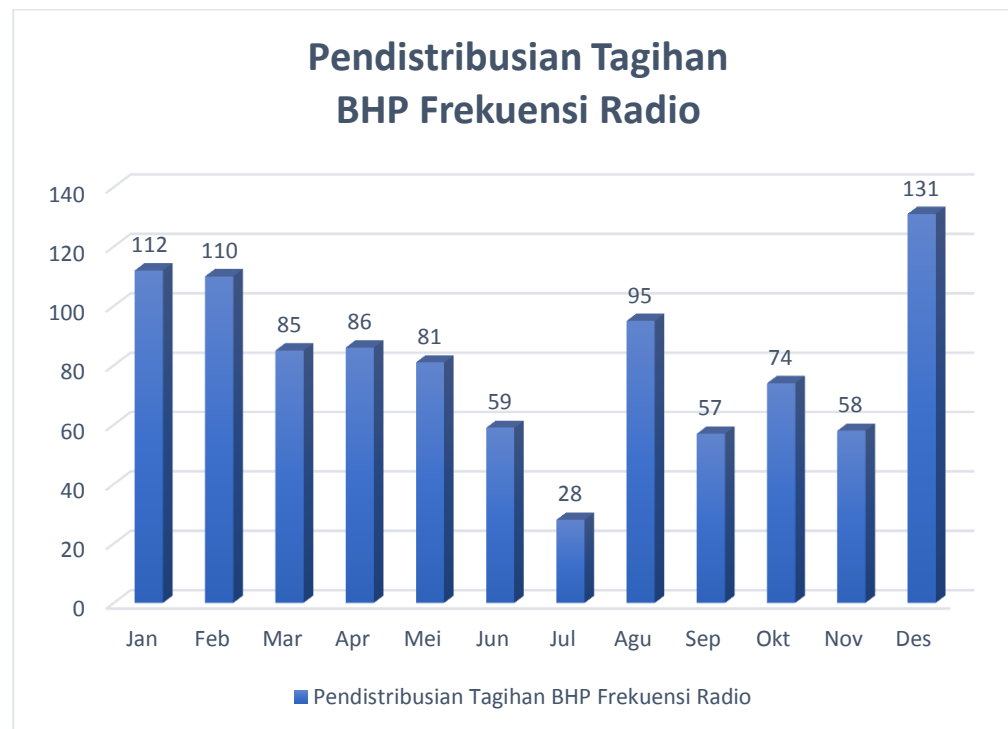
Frekuensi radio

Indikator Kinerja Persentase (%) Penanganan Tagihan BHP Frekuensi Radio memiliki target realisasi sebesar 100 persen. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2021 sebesar 100% sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%. Sepanjang 2021 telah didistribusikan sejumlah 976 tagihan yang diterbitkan

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Penanganan Tagihan BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat dikami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :



Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2021, indikator “Persentase (%) Penanganan Tagihan BHP Frekuensi Radio” telah didistribusikan sejumlah 976 Tagihan yang diterbitkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai 100%

5. IK-5 Persentase Pelaksanaan sosialisasi dan atau SRC/LRC dan jumlah ISR Maritim Nelayan.

Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan sosialisasi dan atau SRC/LRC dan jumlah ISR Maritim Nelayan memiliki target realisasi sebesar 90%. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2021 telah dilaksanakan 8x MOTS dengan peserta sebanyak 240 orang dan ISR sebanyak 1 ISR sehingga persentase pelaksanaan sebesar 73% dan target adalah 90% sehingga persentase kinerja mencapai 81,11% Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Layanan Alternatif Pelayanan ISR dan SOR bagi Nelayan (Maritim On The Spot)	90%	73%	81.11%





Kegiatan Sosialisasi Maritim On The Spot

6. IK-6 Pelaksanaan Inspeksi Stasiun Radio Terkait Validasi Data ISR

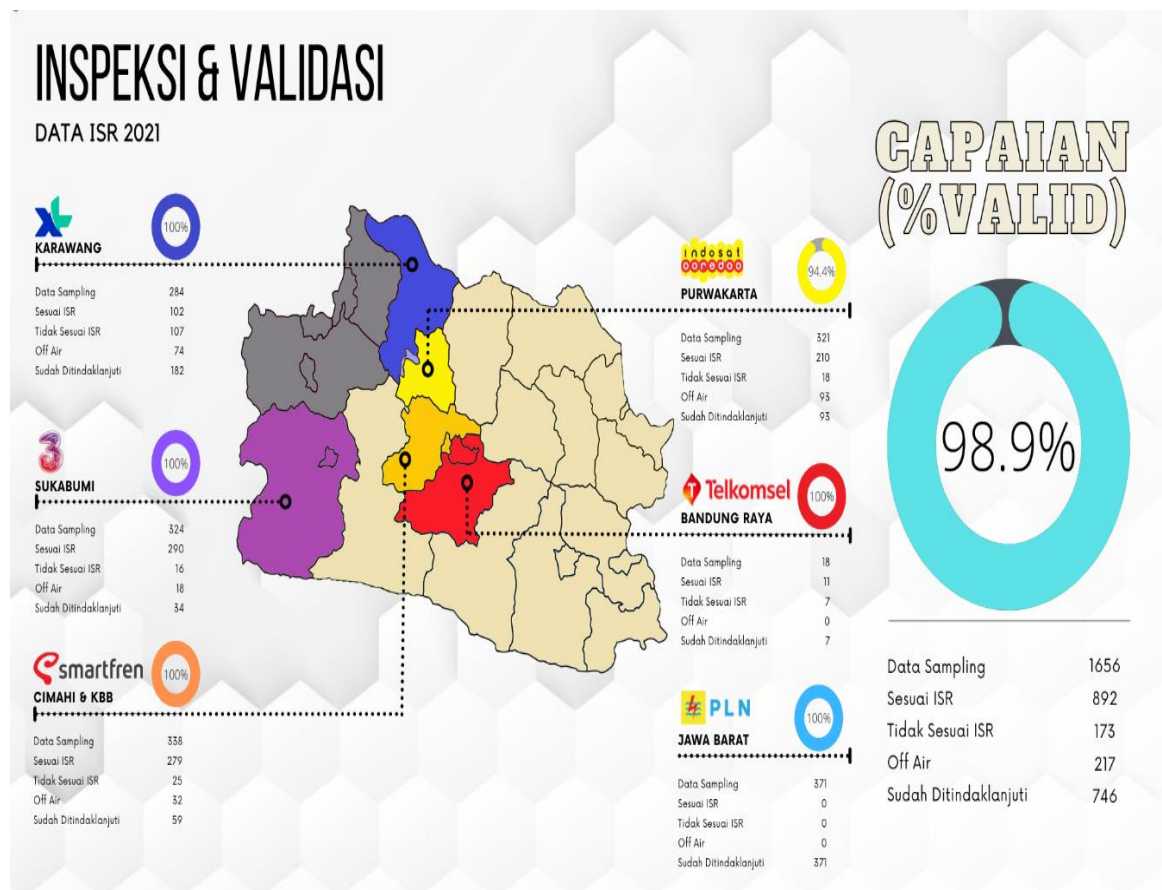
Pada daftar perjanjian kinerja tahun 2021 Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung ditargetkan 90,00% kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR dari 1656 (seribu enam ratus lima puluh enam) data sample ISR Microwave Link yang ditetapkan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI. Kemudian, jumlah target kegiatan inspeksi tahun 2021 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung adalah 10 (sepuluh) kegiatan di wilayah Jawa Barat. Sampai dengan Desember 2021 data yang dapat diinspeksi adalah 1638 (seribu enam ratus tiga puluh delapan) frekuensi Microwave Link yang telah lakukan inspeksi 1434 (sesuai ISR 892 frekuensi Microwave Link dan tindaklanjut pengurusan

izin/penggunaan 746 frekuensi Microwave Link) atau capaiannya kinerjanya sebesar 98.91%. Hasil pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR adalah:

Jumlah Sampling	Hasil Inspeksi Lapangan				Hasil Tindak Lanjut		
	Sesuai ISR	Tidak Sesuai ISR	(Off-Air)	Tidak Berizin/Proses ISR	Sudah Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti	Sesuai ISR
1981	1027	318	534	102	911	43	1027

Sumber: Data Seksi PP (2021).

Sedangkan, sebaran hasil pelaksanaan kegiatan inspeksi tahun 2021 adalah sebagai berikut:



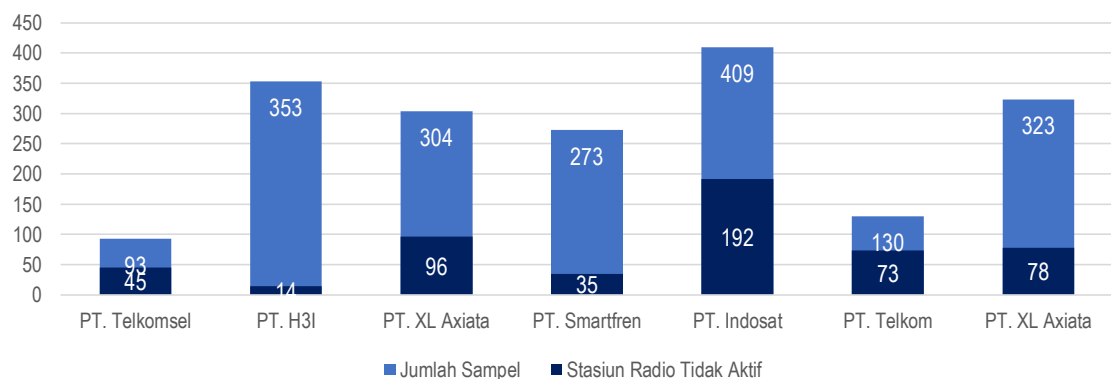
Sumber: Data Seksi PP (2021).

Sedangkan, sebaran hasil pelaksanaan kegiatan inspeksi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Operator	Data Sampling	Hasil Inspeksi				Tindakanlanjut Hasil Inspeksi Yang Tidak Sesuai ISR		Capaian (%Valid)
		Stasiun Radio Aktif		Stasiun Radio Tidak Aktif	Proses ISR	Sudah Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti	
		Sesuai ISR	Tidak Sesuai ISR					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PT. Telkomsel	93	21	26	45	1	70	2	97.85
PT. H3I	353	237	94	14	8	75	41	88.39
PT. XL Axiata	304	100	77	96	31	204	0	100.00
PT. Smartfren	273	193	37	35	8	80	0	100.00
PT. Indosat	409	214	3	192	0	195	0	100.00
PT. Telkom	130	30	25	73	2	100	0	100.00
PT. XL Axiata	323	199	46	78	0	124	0	100.00
PT. AKUR PRATAMA	96	33	10	1	52	63	0	100.00
TOTAL	1981	1027	318	534	102	911	43	97.83

Sumber: Data Seksi PP (2021).

Berdasarkan hasil rekapitulasi atas perizinan baru hasil inspeksi yang dilakukan tahun 2021 telah berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor telekomunikasi atas bea hak penggunaan (BHP) frekuensi radio sebesar Rp. 14.094.890.962,00 (empat belas miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



Sumber: Data Seksi PP (2021).

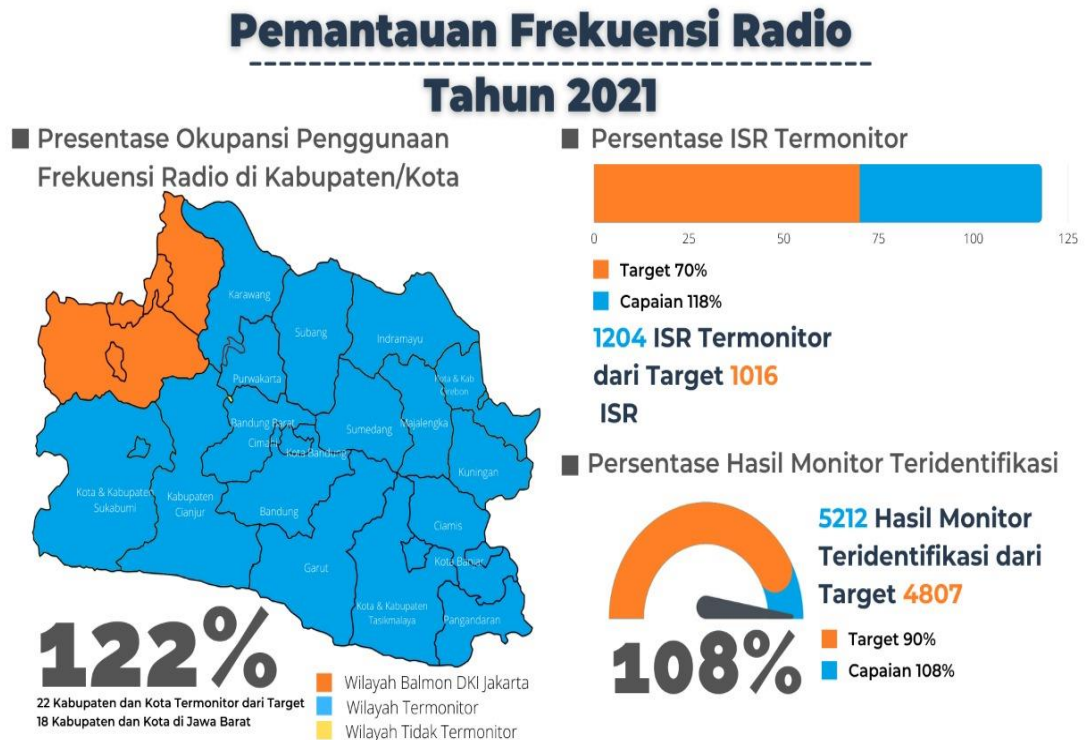


Kegiatan Inspeksi Stasiun Radio Terkait Validasi Data ISR

7. IK-7 Persentase Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kab/Kota

Pada tahun anggaran 2021, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung memiliki target pelaksanaan kegiatan observasi dan monitoring spektrum frekuensi radio sebanyak 24 (dua puluh empat) kegiatan untuk observasi dan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio 21 pita frekuensi yang ada di 22 (dua puluh dua) wilayah kota/kabupaten di Propinsi Jawa Barat. Realisasi pelaksanaan kegiatan observasi dan monitoring frekuensi radio tersebut adalah 24 (dua puluh empat) kegiatan dengan jumlah kabupaten/kota yang termonitor adalah 22 (dua puluh dua) kabupaten/kota dari jumlah target kabupaten/kota termonitor adalah sebanyak 18 (delapan belas) kabupaten/kota atau dengan kata lain capaian kinerjanya adalah 100.00% dari yang ditargetkan pada perjanjian kinerja tahun 2021 sebesar 80%. Pelaksanaan 24 (dua puluh empat) kali kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan okupansi penggunaan 22 (dua puluh dua) subservice spektrum frekuensi radio di 22 (dua puluh

dua) kabupaten/kota dan pelacakan penggunaan frekuensi ilegal yang ada di 22 (dua puluh dua) kabupaten/kota dan pemantauan perangkat telekomunikasi di tiga wilayah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

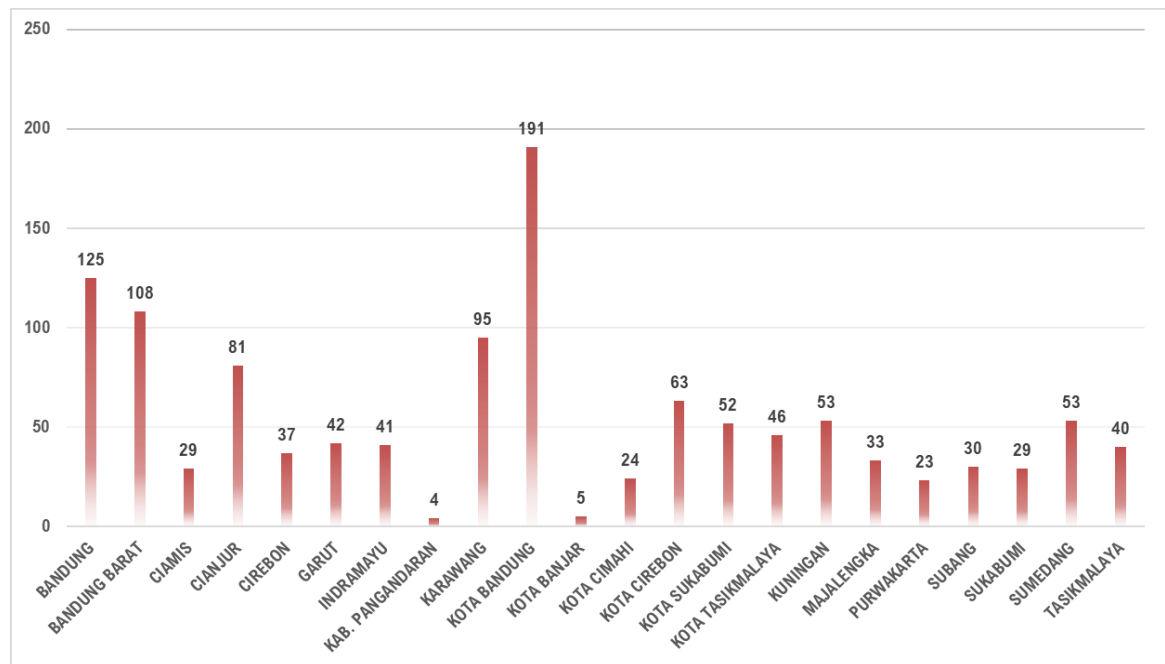


Sumber: Justian Nurdiansyah, Hasil Olahan Data Okupansi dan Monitor Spektrum Frekuensi Radio (2021).

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa capaian untuk Indikator Kinerja “Persentase (%) Kabupaten/kota yang dapat dimonitor” dari target 80% kabupaten/kota dari Januari 2021 sampai dengan Desember 2021, jumlah kabupaten/kota yang termonitor adalah 100,00%. Capaian 100,00% tersebut telah melebihi target yang harus dicapai yaitu 80% dengan selisih antara capaian dan target adalah 20,00%.

8. IK-8 Persentase Jumlah ISR yang Termonitor

Jumlah ISR yang termonitor Dari 22 (dua puluh dua) kabupaten/kota yang dilakukan monitoring telah termonitor 1204 (seribu dua ratus empat) ISR dari 1452 (seribu empat ratus lima puluh dua) ISR atau sebesar 82,92%. Adapun jika dibandingkan dengan target 70,00% dari total ISR yaitu 1016 (seribu enam belas) ISR, maka capaian 1204 (seribu dua ratus empat) ISR di tahun 2021 adalah lebih dari 100,00%.



Sumber: Hasil Olahan Data Seksi PP (2021).

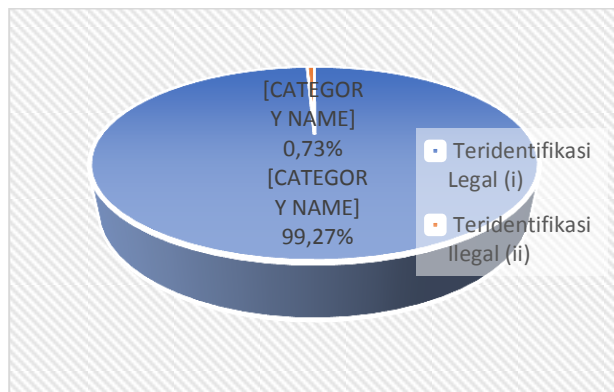
Tampilan di atas menunjukkan jumlah ISR termonitor hasil pelaksanaan pemantauan yang dilakukan di 22 (dua puluh dua) kota/kabupaten yang ada di Jawa Barat selama tahun 2021. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah ISR yang belum termonitor adalah 1204 (seribu dua ratus empat) ISR dari 1452 (seribu empat ratus lima puluh dua) ISR atau sebesar 82,92%.

9. IK-9 Persentase ISR Hasil monitoring yang Teridentifikasi.

Jumlah ISR Hasil Monitoring sebanyak 1204 (seribu dua ratus empat) ISR di tahun 2021 yang teridentifikasi dari jumlah tersebut adalah 1204 (seribu dua ratus empat) ISR atau sebesar 100,00%, dengan rincian:

Kategori Termonitor	Jumlah
Teridentifikasi Legal (i)	1204
Teridentifikasi Illegal (ii)	120
Total (iii)	16.476
Persentase [(i)/(iii)]	99,27%

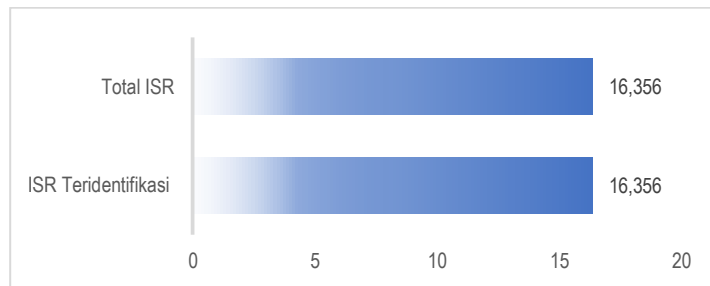
Sumber: Hasil Olahan Data Seksi PP (2021).



Sedangkan, persentase antara total ISR teridentifikasi dengan total ISR hasil pelaksanaan monitoring penggunaan frekuensi radio selama Tahun 2021 adalah 100,00%, yaitu:

Kategori Termonitor	Jumlah
ISR Teridentifikasi	16.356
Total ISR	16.356
Persentase	100,00%

Sumber: Hasil Olahan Data Seksi PP (2021).



Sumber: Hasil Olahan Data Seksi PP (2021).

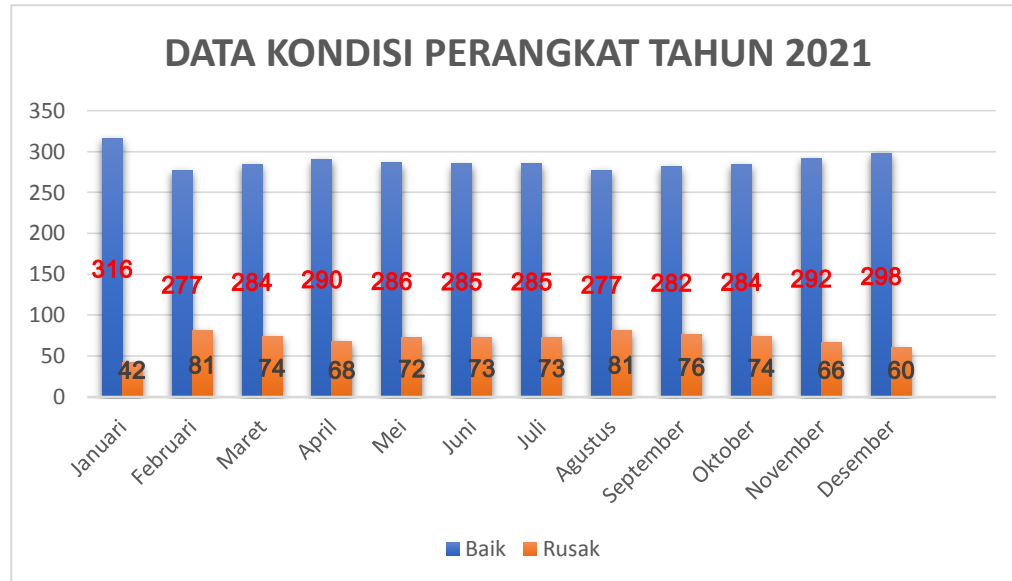
Dengan demikian, dari 20 (dua puluh) kabupaten/kota yang dilakukan monitoring persentase ISR teridentifikasi adalah 16.356 (enam belas ribu tiga ratus lima puluh enam) ISR dari 16.476 (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) total ISR legal atau sebesar 100,00%

10. **IK-10 Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur UPT**

Indikator Kinerja Persentase (%) Penanganan perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT memiliki target realisasi sebesar 80%. Berdasarkan data capaian diketahui bahwa nilai dari realisasi sampai akhir Desember 2021 sebesar 79.77%, sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Penanganan perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	80%	80%	100%

Dengan total perangkat yang dimiliki sebanyak 358 (tiga ratus lima puluh delapan) unit yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan, pada akhir tahun sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) unit dalam keadaan Baik, sedangkan 66 (enam puluh enam) unit dalam keadaan Rusak



Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Persentase (%) berfungsiya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT” telah terjadwal dan dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai (100%).

11. IK-11 Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Pada tahun anggaran 2021, Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung memiliki target 19 (dua puluh satu) kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio di wilayah Jawa Barat dengan target pada perjanjian kinerja 100% aduan/klaim yang diselesaikan, upaya penanganan gangguan frekuensi radio telah dilaksanakan 19 (sembilan belas) aduan gangguan di tahun 2021 dengan penyelesaian aduan/klaim gangguan adalah 100% terselesaikan atau tidak terjadi lagi *interference*

pada aduan yang sama (*clear*). Komposisi aduan gangguan frekuensi yang terjadi selama tahun 2021 adalah:

PIHAK TERGANGGU	NO. SURAT PENGADUAN	TGL SURAT PENGADUAN	TGL TERIMA SURAT PENGADUAN	TGL SPT	KET
PELANGI BAHANA SWARA, PT.	01/PBS/XII/2021	02-01-2021	08-01-2021	13-01-2021	Clear
RADIO MARTHA DARIA, PT.	Korwil PRSSNI/I/2021	11-01-2021	11-01-2021	20-01-2021	Clear
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	53/DJSDPPI.4/SP.03.04/01/2021	30-01-2021	30-01-2021	03-02-2021	Clear
PT XL Axiata	001/SP&O/II/2021	10-02-2021	10-02-2021	10-02-2021	Clear
RADIO MANGGALA TETAP JAYA, PT.	010/SM/TR-CJR/II/2021	10-02-2021	10-02-2021	10-02-2021	Clear
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	103/KOMINFO/DJSDPPI.4/SP.3/02/2021	12-02-2021	12-02-2021	14-02-2021	Clear
BALAI MONITOR KELAS II BANDUNG	062/Balmon,32/KP.01.06/02/2021	14-02-2021	14-02-2021	17-02-2021	Clear
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	53/DJSDPPI.4/SP.03.04/01/2021	30-01-2021	21-02-2021	28-02-2021	Clear
PT. Radio Trinada Gemilang Persada	011/TGP/VII/2021	07-07-2021	08-07-2021	13-07-2021	Clear
Rakom Forbeka	33/lsm-forbeka/VII/2021	17-07-2021	18-07-2021	20-07-2021	Clear
PT. Radio Siaran Jusyan Media	043/RJM/SK/VII/2021	06-07-2021	09-07-2021	20-07-2021	Clear
PT. Radio Swara Cisompet Bahana	026/sr-rbs/VII/2021	09-07-2021	21-07-2021	03-08-2021	Clear
PT. Telkomsel	038/TC.01/RC.04/VII/2021	13-07-2021	29-07-2021	10-08-2021	Clear
Kodam III Siliwangi	B/1378/VIII/2021	28-08-2021	07-09-2021	14-09-2021	Clear
AirNav Indonesia	023/G/19/LPPNP I/TEK.05/VIII/2021	31-08-2021	31-08-2021	01-09-2021	Clear
HUTCHISON 3 INDONESIA, PT	2424/H3I/GOV/11/2020	24-11-2020	26-11-2020	30-11-2020	Clear

PERUM LPPNPI	080/G/19/LPPNP I/TEK.05/XI/2020	27-11- 2020	27-11- 2020	30-11- 2020	<i>Clear</i>
INDOSAT TBK, PT.	14-089-12-20	10-12- 2020	10-12- 2020	10-12- 2020	<i>Clear</i>
PT SMART TELECOM, TBK.	3722/LO- BOD/ST/REG/XII/ 2020	17-12- 2020	18-12- 2020	21-12- 2020	<i>Clear</i>

Sumber: Data Seksi PP (2020)

Berdasarkan gambar di atas komposisi penyelesaian aduan gangguan tertinggi adalah gangguan frekuensi siaran FM pada range frekuensi radio siaran dari 87,70 MHz – 108,00 MHz yang umumnya terjadi akibat adanya pengguna frekuensi radio siaran FM ilegal di wilayah radio siaran FM terganggu.

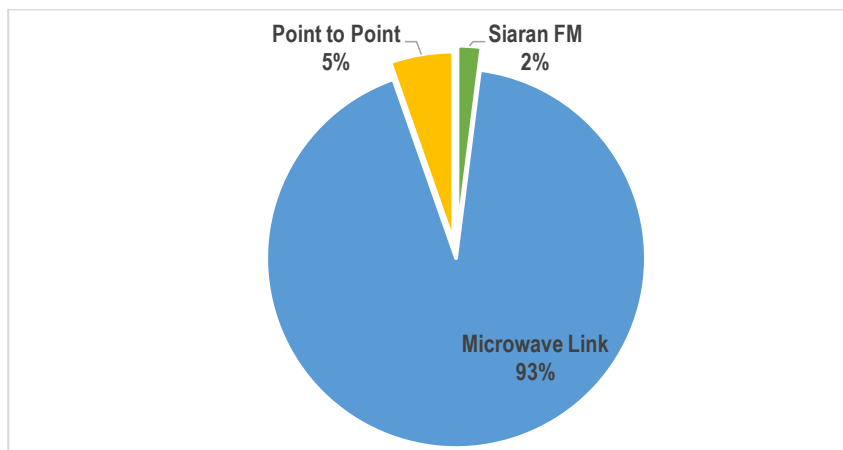


Kegiatan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

12.IK-12 Persentase Penertiban Spektrum Frekuensi Radio

Pada tahun anggaran 2021 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas I Bandung memiliki target 70% kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio, dengan program kerja kegiatan pelaksanaan penertiban penggunaan frekuensi radio sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan dan tindak lanjut hasil penertiban sebanyak 3 (tiga) kegiatan di wilayah Jawa Barat. Selama tahun 2021, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I

Bandung telah melaksanakan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio sebanyak 10 (sepuluh) kali kegiatan dengan hasil pengguna frekuensi ilegal sebanyak 118 (seratus delapan belas) spektrum frekuensi radio. Dari 118 (seratus delapan belas) tersebut telah dilakukan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kata lain capaiannya indikator kinerja ini adalah 100,00%. Kemudian, dilaksanakan juga kegiatan tindak lanjut hasil penertiban telah sebanyak 3 (tiga) kegiatan pengguna frekuensi ilegal dengan hasil penindakan dalam bentuk pembinaan. Adapun sebaran pelaksanaan penertiban dan tindak lanjut hasil penertiban selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Seksi PP (2021)

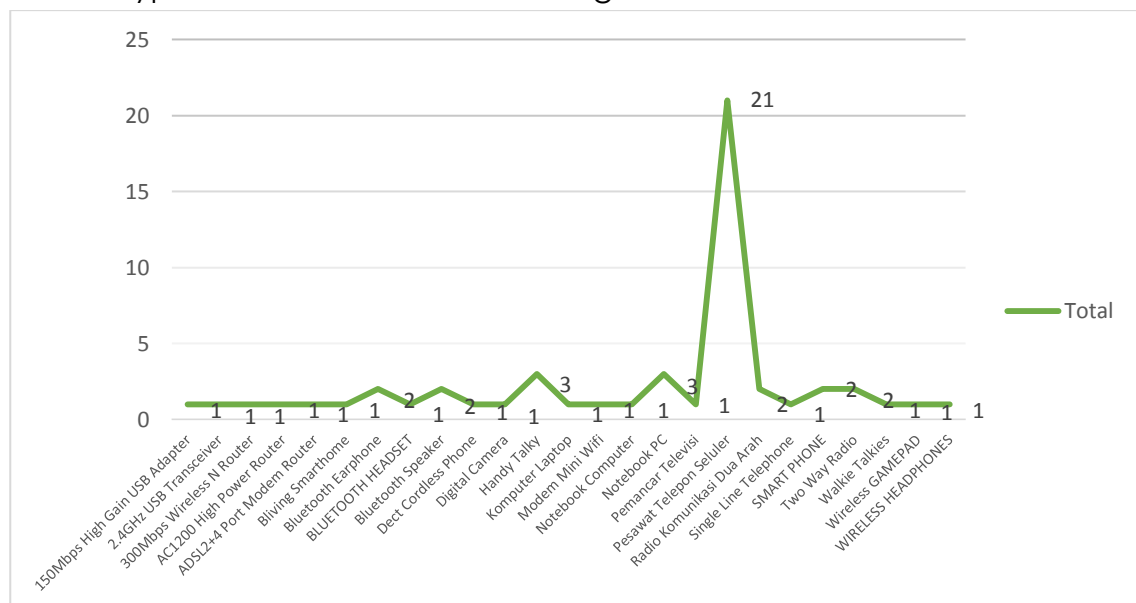




Kegiatan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio

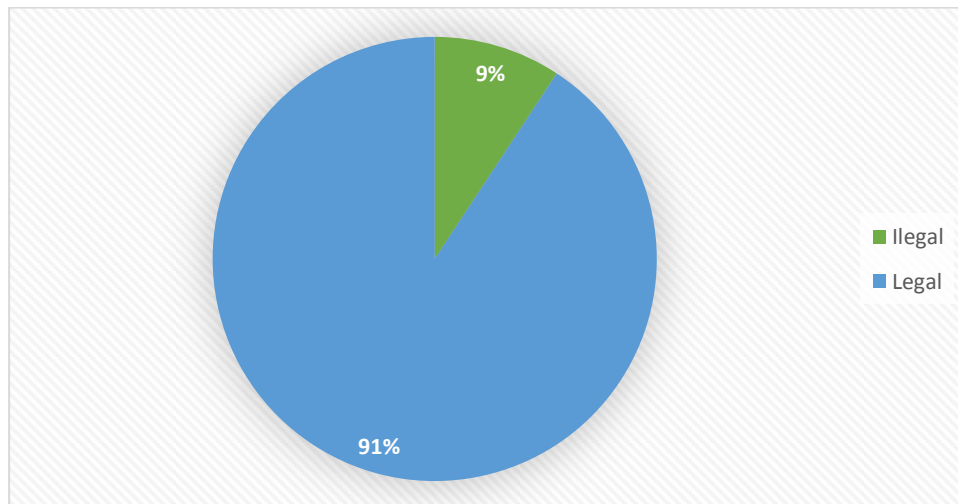
13. IK-13 Monitoring Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi

Pada tahun anggaran 2021 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas I Bandung memiliki target 3 (tiga) kali kegiatan sertifikat alat/perangkat telekomunikasi. Dari target tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melaksanakan 3 kali kegiatan kegiatan sertifikat alat/perangkat telekomunikasi yang dilakukan pada empat wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Ciamis terhadap pada 171 (seratus tujuh puluh satu) perangkat telekomunikasi dengan rincian 20 (dua puluh) tidak bersertifikat dan 151 (seratus lima puluh satu) bersertifikat, dengan rincian type dan status sertifikat sebagai berikut:



Sumber: Data Seksi PP (2021)

Jumlah perangkat yang dapat dilakukan pemantauan terbanyak adalah perangkat smartphone atau telepon seluler sebanyak 21 (dua puluh satu) perangkat disusul dengan perangkat-perangkat Handy Talky dan Notebook PC masing 3 perangkat. Sedangkan perbandingan antara perangkat yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Seksi PP (2021)

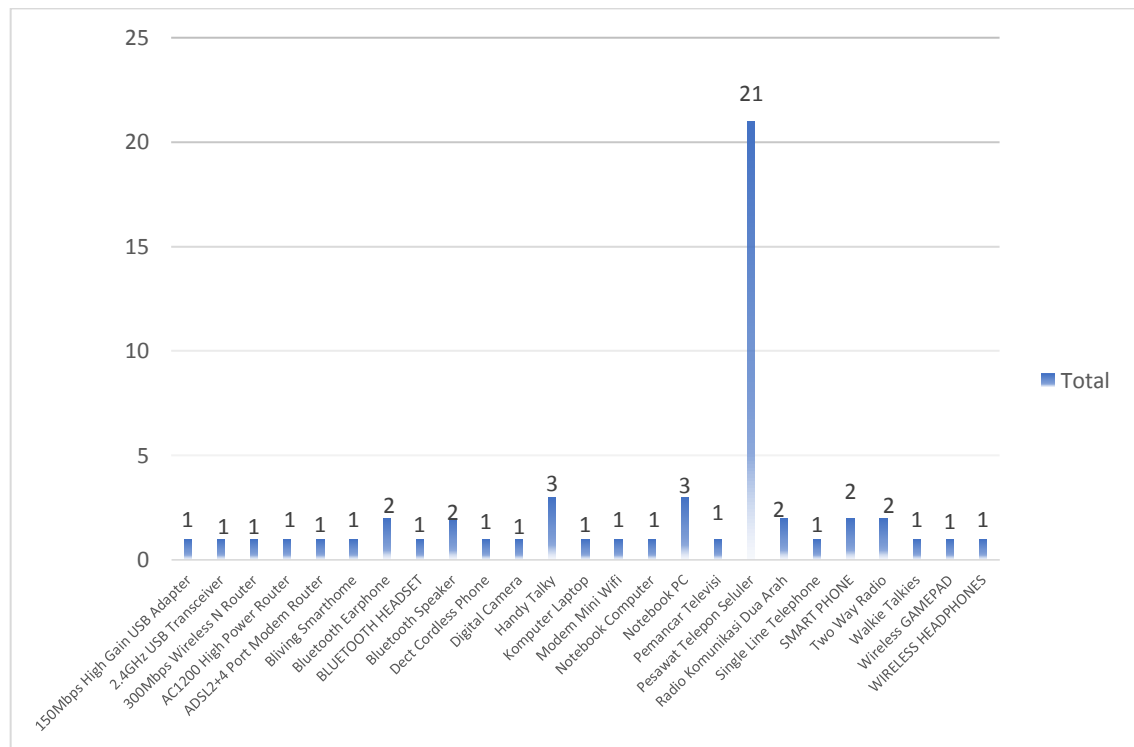


Kegiatan Monitoring Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi

14. IK-14 Penanganan Piutang yang Telah Dilimpahkan ke KPKNL.

Pada tahun anggaran 2021 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas I Bandung memiliki target 1 (satu) kali kegiatan penertiban sertifikat alat/perangkat telekomunikasi. Target tersebut telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten

Ciamis terhadap 20 (dua puluh) alat/perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikat melalui tindakan penerbitan surat peringatan, dengan rincian type dan status setrtifikat sebagai berikut:



Sumber: Data Seksi PP (2021)

Jumlah perangkat yang dapat dilakukan pemantauan terbanyak adalah perangkat smartphone atau telepon seluler sebanyak 21 (dua puluh satu) perangkat disusul dengan perangkat-perangkat Handy Talky dan Notebook PC masing 3 perangkat.

SASARAN KEGIATAN 2: TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF.

1. **IK-1 Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**

Pada tahun 2021 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas I Bandung capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggarannya adalah sebesar 88,53%. Skor tersebut telah melebihi target dalam indikator perjanjian kinerja Ditjen SDPPI tahun 2021.

CAPAIAN KINERJA dan IKPA Tahun 2021

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I BANDUNG

Dashboard



Sumber: Aplikasi SMART DJA KEMENKEU <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/2021/index.php/satker/welcome>

Perbandingan Capaian PK Tahun 2020 – 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2021
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi.	1. Persentase Pengukuran Stasiun Radio Dan Televisi Siaran Di Wilayah Kerja.	140,88%	153.60%
		2. Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik.	103,00%	113,63%
		3. Persentase Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT.	100,00%	100,00%
		4. Persentase Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi radio	100,00%	100,00%
		5. Persentase Pelaksanaan sosialisasi dan atau SRC/LRC dan jumlah ISR Maritim Nelayan.	10,00%	81,11%

	6. Pelaksanaan Inspeksi Stasiun Radio Terkait Validasi Data ISR.	115,10%	111,11%
	7. Persentase Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kab/Kota	113,64%	125,00%
	8. Persentase Jumlah ISR yang Termonitor	130,32%	142,86%
	9. Persentase ISR Hasil monitoring yang Teridentifikasi.	111,11%	110,00%
	10. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur UPT	100,00%	100,00%
	11. Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	100,00%	103,09%
	12. Persentase Penertiban Spektrum Frekuensi Radio	100,00%	138,86%
	13. Monitoring Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi	100,00%	100,00%
	14. Penertiban Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi	100,00%	100,00%
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif.	2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score).	96,21% 102,94%

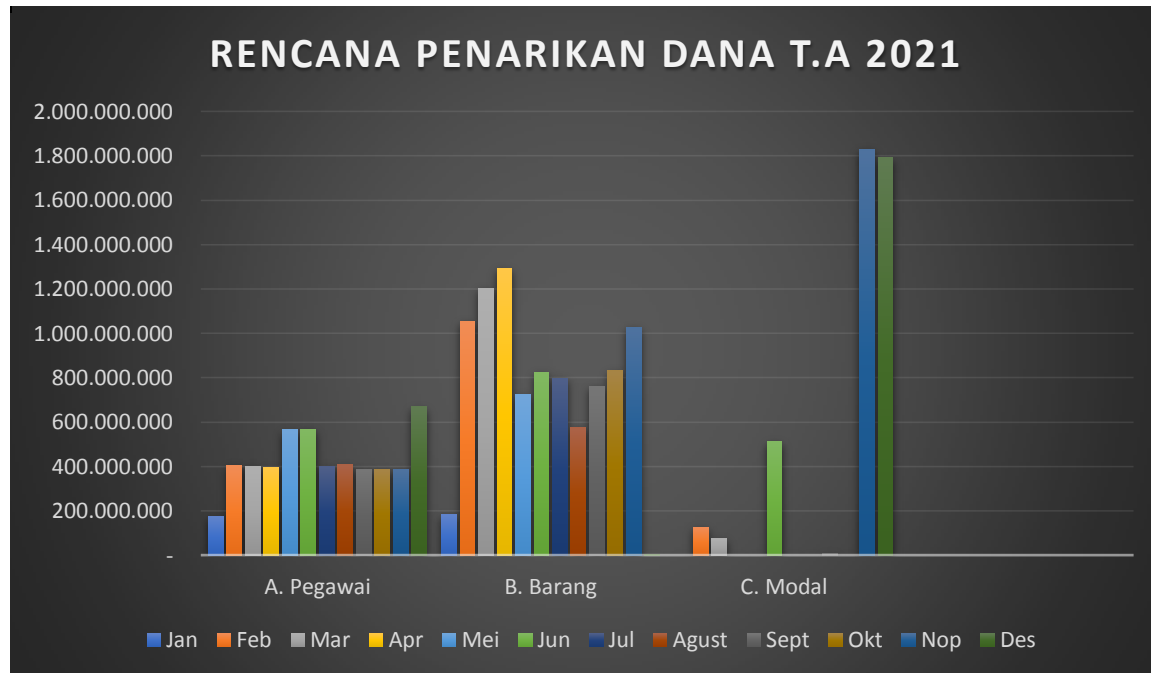
B. PENATAUSAHAAN ANGGARAN DAN KERUMAHTANGGAAN

a. Perencanaan dan Pelaporan Program Kerja Anggaran

Pada tahun 2021 jumlah anggaran awal Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung sebesar **Rp. 20.897.051.000,-** (dua puluh milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari Rupiah Murni dan PNBP. Adapun rincian program kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung adalah:

No.	Kode Output	Uraian	Volume	Pagu (Rp)
1	449.BAH.006	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi Dan Penertiban	76.0 Layanan	1.742.922.000
		1. Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota	4	30.286.000
		2. Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota	20	605.752.000
		3. Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	2	8.750.000
		4. Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	8	218.635.000
		5. Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota	10	114.690.000
		6. Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	2	15.464.000
		7. Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	16	399.560.000
		8. Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota	1	16.785.000
		9. Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota	2	55.840.000
		10. Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	10	115.417.000
		11. Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1	161.743.000
2	449.BAH.008	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Bandung, terdiri dari :	24.0 Layanan	468.580.000
		1. Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	2	10.620.000
		2. Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	22	457.960.000
3	449.BAH.078	Layanan Dukungan Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio UPT	1.0 Layanan	3.662.882.000
		1. Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML)		1.139.500.000
		2. Dukungan Tupoksi		698.006.000
		3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran		687.650.000
		4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan		1.137.646.000
4	4489.EAA.103	Gaji dan Tunjangan UPT	1,0 Layanan	5.115.713.000
		Gaji dan Tunjangan		5.115.713.000
5	4489.EAA.104	Operasional dan Pemeliharaan kantor UPT	1,0 Layanan	5.503.604.000
		Operasional dan Pemeliharaan kantor UPT		5.503.604.000
6.	4489.EAA.102	Layanan Internal (Overhead)	1,0 Layanan	4.363.370.000
		1. Pengadaan Kendaraan Bermotor		754.470.000
		2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		2.635.700.000
		3. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		828.200.000
		4. Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan		145.000.000

Agar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun 2021 lebih fokus, efektif dan efisien, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung menetapkan rencana penggunaan anggaran (disburstmen plan)



Dalam pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2021 Balmon SFR Kelas I Bandung telah melakukan revisi anggaran sebanyak 6 (enam) kali, hal ini juga bertepatan dengan masih terjadinya pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia. Sehingga Balmon SFR kelas I Bandung harus melakukan perencanaan dan penjadwalan ulang kegiatan yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya. Revisi anggaran Balmon SFR Kelas I Bandung, yaitu :

No	Item Revisi	Semula	menjadi	Tambah	Kurang
1	Penambahan anggaran MOTS	17.883.165.000	18.163.845.000	280.680.000	
2	Penghematan Belanja 51	18.163.845.000	18.055.051.000		-108.794.000
3	Penambahan anggaran Belanja 53	18.055.051.000	20.497.051.000	2.442.000.000	
4	Revisi utk penanganan COVID	20.497.051.000	20.497.051.000		

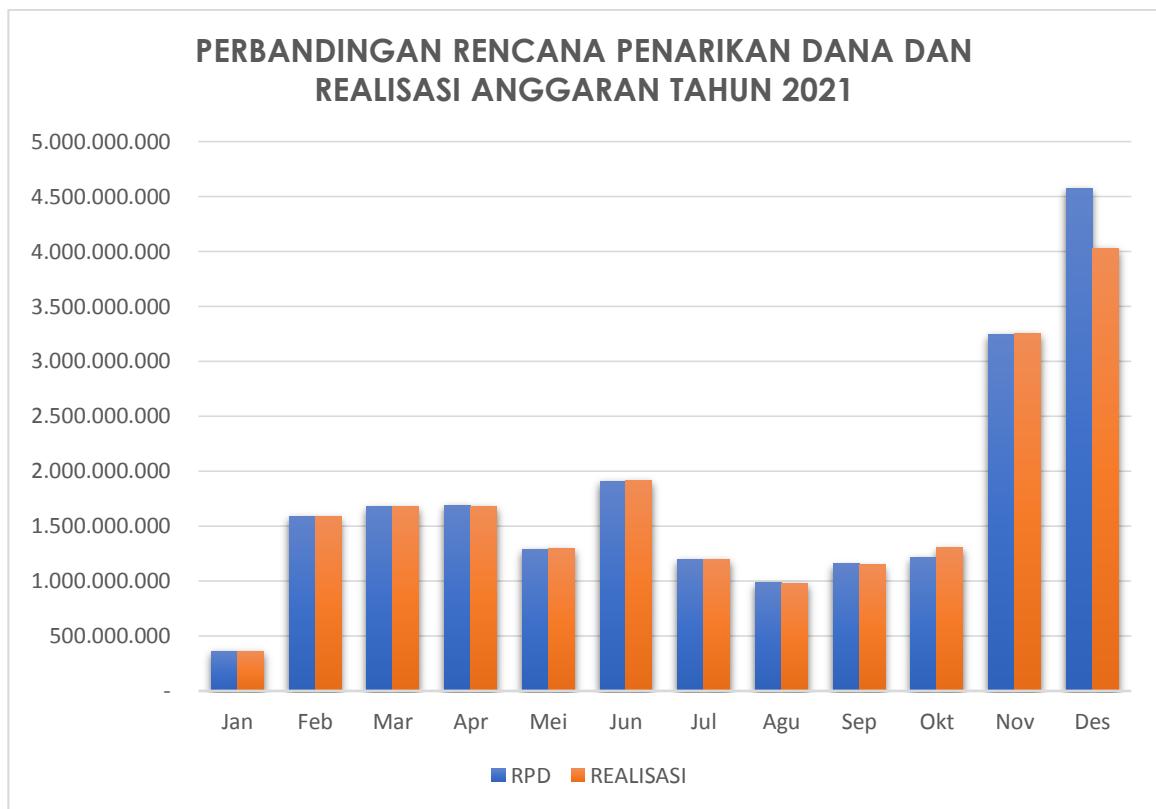
5	Penambahan Belanja 53	20.497.051.000	20.897.051.000	400.000.000	
6	Revisi Pagu Minus di belanja 51	20.897.051.000	20.897.051.000		

Dalam pelaksanaan program kerja Balai Monitor SFR Kelas I Bandung pada tahun anggaran 2021, pencapaian realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 20.434.213.804 atau 97,77 % dari pagu Rp. 20.897.051.000,-. Realisasi penyerapan anggaran Balai Monitor SFR Kelas I Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

REALISASI TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kode Output	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	449.BAH.006	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi Dan Penertiban	1.742.922.000	1.683.849.352	96,61%
		1. Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota	30.286.000	29.200.000	96,41%
		2. Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota	605.752.000	602.776.820	99,51%
		3. Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	8.750.000	5.640.000	64,46%
		4. Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	218.635.000	214.720.000	98,21%
		5. Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota	114.690.000	112.760.000	98,32%
		6. Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	15.464.000	10.250.000	66,28%
		7. Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	399.560.000	390.147.378	97,64%
		8. Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota	16.785.000	16.170.000	96,34%
		9. Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota	55.840.000	52.990.000	94,90%
		10. Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	115.417.000	99.290.6000	86,03%
		11. Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	161.743.000	149.904.554	92,68%
2	449.BAH.008	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Bandung, terdiri dari :	468.580.000	456.082.821	97,33%
		1. Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	10.620.000	4.300.000	40,49%
		2. Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	457.960.000	451.782.821	98,65%

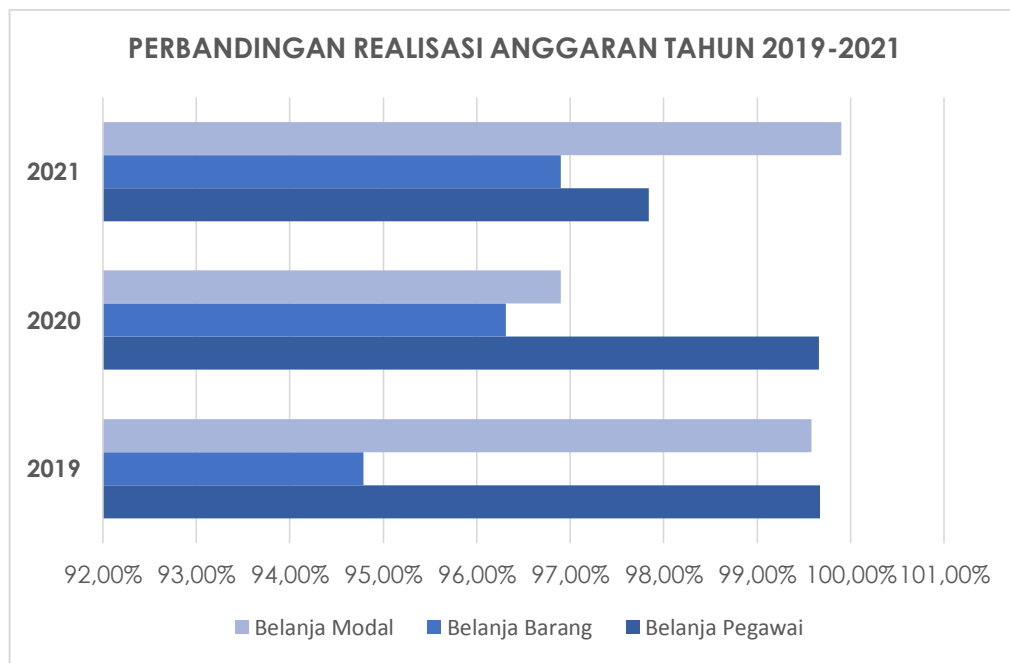
3	449.BAH.078	Layanan Dukungan Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio UPT	3.662.882.000	3.592.777.504	98,09%
		1. Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML)	1.139.500.000	1.138.000.000	99,87%
		2. Dukungan Tupoksi	698.006.000	607.635.391	87,05%
		3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	687.650.000	664.468.851	96,63%
		4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan	1.137.646.000	1.092.673.262	96,05%
4	4489.EAA.103	Gaji dan Tunjangan UPT	5.115.713.000	5.044.123.143	98,60%
		Gaji dan Tunjangan	5.115.713.000	5.044.123.143	98,60%
5	4489.EAA.104	Operasional dan Pemeliharaan kantor UPT	5.503.604.000	5.303.786.314	96,37%
		Operasional dan Pemeliharaan kantor UPT	5.503.604.000	5.303.786.314	96,37%
6.	4489.EAA.102	Layanan Internal (Overhead)	4.363.370.000	4.353.594.670	99,78%
		1. Pengadaan Kendaraan Bermotor	754.470.000	754.430.000	99,99%
		2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	2.635.700.000	2.627.677.498	99,70%
		3. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	828.200.000	827.057.000	99,86%
		4. Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	145.000.000	144.430.172	99,61%



Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2018-2021

No	Jenis Belanja	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Belanja Pegawai	99,67%	99,66%	97,84%
2.	Belanja Barang	94,79%	96,31%	96,90%
3.	Belanja Modal	99,58%	97,85%	99,9%
4.	Total Realisasi	96,42%	97,55%	97,77%

Pada tabel diatas dapat dilihat realisasi penyerapan anggaran Balmon SFR Kelas I Bandung mengalami kenaikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Perbandingan realisasi penyerapan anggaran tahun 2018-2021 dalam grafik tersaji berikut ini :



b. Ketatausahaan dan Kearsipan

Kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi pengagendaan surat masuk dan surat keluar yang berasal dari lingkungan Kementerian Kominfo, Ditjen SDPPI dan jajaran Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi Jawa Barat serta para Penyelenggara/pengguna Spektrum Frekuensi Radio :

- ✓ Surat masuk selama periode bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebanyak 1267 surat.
- ✓ Surat keluar yang diterbitkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2021 sebanyak 587 surat
- ✓ Surat Perintah Tugas pada Tahun Anggaran 2021 sebanyak 353 surat.

c. Kerumahtanggaan

Pada Akhir tahun 2021 Penambahan belanja modal sebanyak 24 jenis barang dan kapitalisasi Gedung nilai Rp. 3.946.103.972. Nilai buku asset BMN tahun 2020 senilai Rp. 26.832.183.822 dan BMN tercatat tahun 2021 sebesar Rp.

31.450.593.849. Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung, didukung sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan tugas-tugas dimaksud antara lain :

1. Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung

Balai Monitor Kelas I Bandung terletak di: Jl. Pacuan Kuda no. 146, Sukamiskin, Arcamanik, Bandung Jawa Barat.



2. Stasiun Monitoring Master

Stasiun Monitoring Master terletak di Jl. Purbasari No.1 RT.06/RW 11, Sukamiskin, Arcamanik, Bandung Jawa Barat.



3. Stasiun Slave Cigondewah

Stasiun Slave Cigondewah terletak di Jl. Cigondewah Hilir RT.01 / RW.09 Margaasih, Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat.



4. Stasiun Slave Cileunyi

Stasiun Slave Cileunyi terletak di Kampung Tanjakan Muncang Rt.04/Rw.06, Cileunyi Wetan, Cileunyi, Kabupaten Bandung.



5. Stasiun Slave Lembang

Stasiun Slave Lembang terletak di Kampung Sindang Wangi RT.01 RW.09, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.



6. Shelter Cirebon

Shelter Cirebon terletak di Jl. Benda Kondangsari RT.17 RW.06, Beber, kabupaten Cirebon.



7. Rumah Dinas

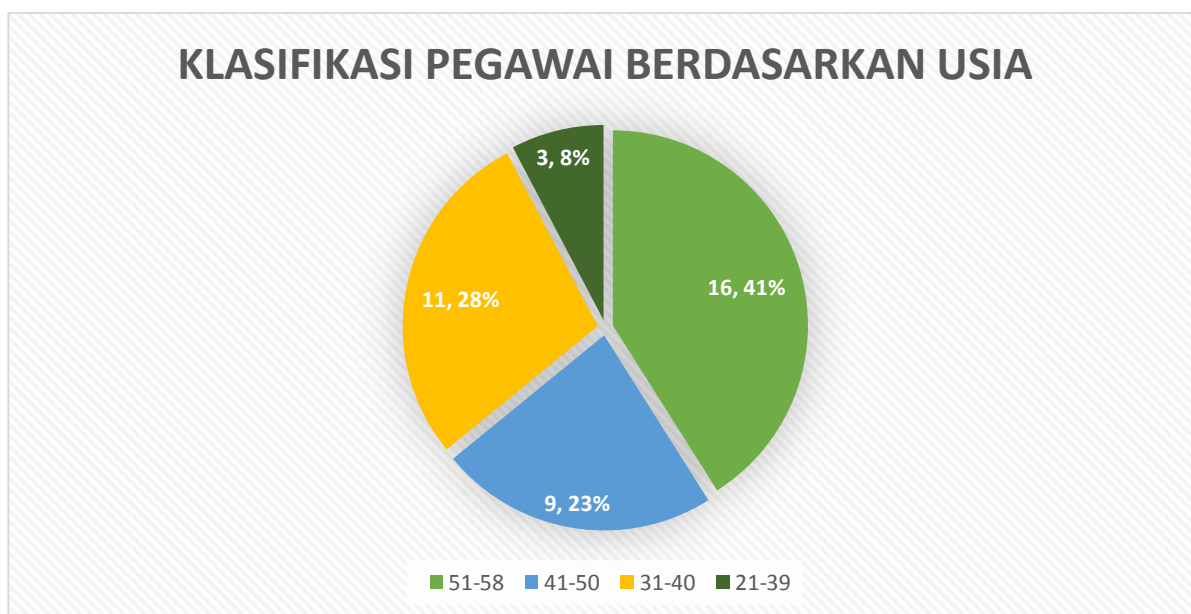
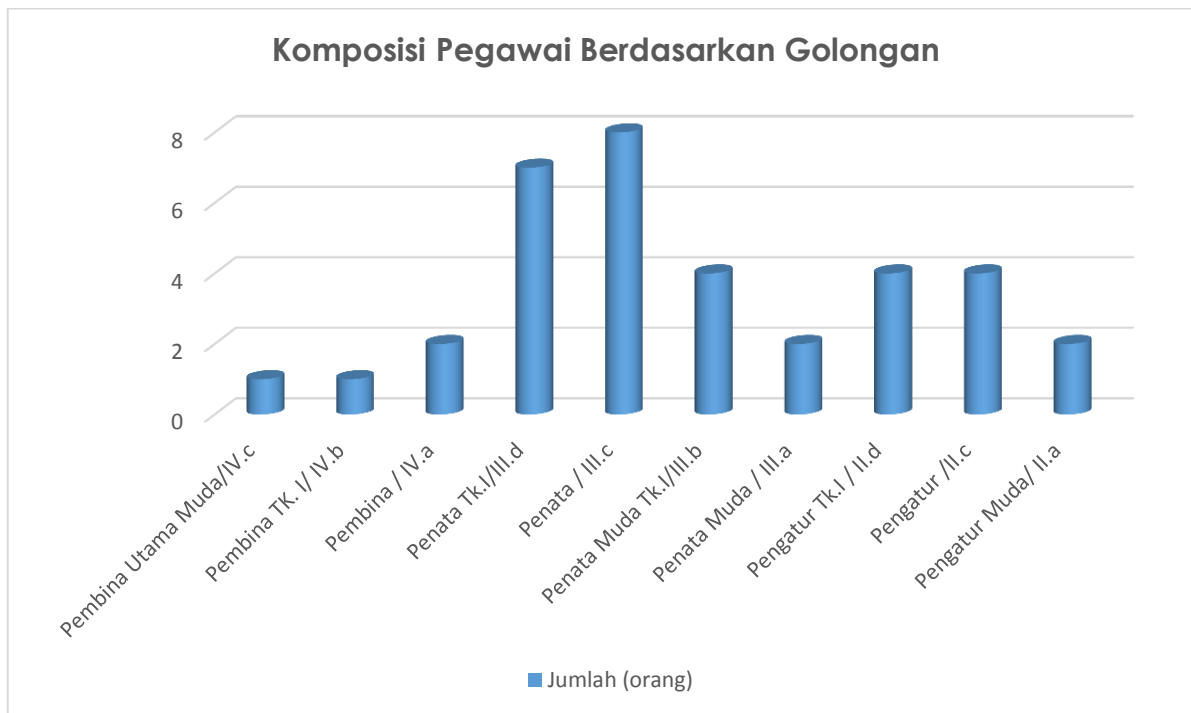
Balai Monitor Kelas I Bandung memiliki 4 (empat) buah rumah dinas yang terletak di Jl. Purbasari Indah no. 23-29 Rt.06 / Rw.01, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Bandung.



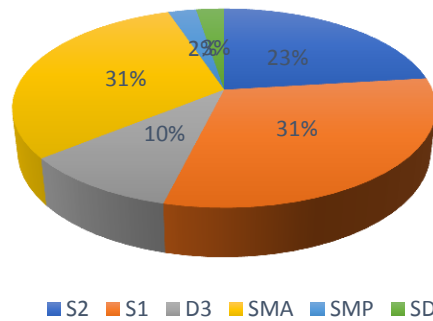
d. Kepegawaian

Pada tahun 2021 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas I Bandung memiliki sumber daya manusia sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) pegawai

negeri sipil (PNS), 41 (empat puluh satu) pegawai pemerintah non PNS (PPNPN)



KLASIFIKASI BERDASARKAN PENDIDIKAN



✓ Pejabat Pengendali Spektrum Frekuensi Radio

Data Pejabat Pengendali Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2021

No.	Fungsional	Jumlah
1	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Madya	2
2	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda	6
3	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama	1
4	Pengendali Frekuensi Radio Terampil Penyelia	2
5	Pengendali Frekuensi Radio Terampil Pelaksana Lanjutan	2
6	Pengendali Frekuensi Radio Terampil Pelaksana	3
Jumlah		16

✓ Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Data PPNS Tahun 2021

NO	Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan
1.	Zainuddin Kalla	Pembina Tk.1 / IV.b	Kepala Balai Monitor
2.	Herman Soleh	Penata Tk.1 / III.d	Kasubbag TU/RUTA
3.	Luthfi	Penata Tk.1 / III.d	Subkoordinator Seksi Pemantauan dan Penertiban

4.	Rekan Karyono	Penata Tk.1 / III.d	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda
5.	Rudi Herawan	Penata Tk.1 / III.d	Penyidik PNS
6.	Ravi Ryan Ibrani	Penata Tk.1 / III.d	Penyidik PNS
7.	Sidiq Purnomo	Penata / III.c	Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana Lanjutan
8.	Asep Wirahman	Penata Muda Tk.1 / III.b	Penyidik PNS

✓ **Mutasi Pegawai**

Data Mutasi Pegawai Pada tahun 2021

NO	Nama	Satker Lama	Satker Baru	TMT
1.	Arie Maulana Ma'rif	Balmon Klas I Bandung	Biro Keuangan – Kemkominfo	01-10-2021
2.	Hendi Herdiana	BalmonKelas II Banjarmasin a	Balai Monitor SFR Kelas I Bandung	01-11-2021

Data Pegawai Purna Bakti Pada tahun 2021

NO	Nama	Pangkat/ Golongan Lama	Pangkat/ Golongan Baru	TMT
1.	Utang Setya Erawan	Penata Tk.I/III.d	Pembina/IV.a	01-Sep-21
2.	Didi Sugandi	Pengatur TK. I/II.d	Penata Muda/III.a	01-Sep-21
3.	Rekan Karyono	Penata Tk.I/III.d	Pembina/IV.a	01-Des-21
4.	Budiana	Pengatur /II.c	Pengatur TK. I/II.d	01-Des-21

C. KINERJA LAINNYA

1. Pelayanan Loker Konsultasi dan Pengaduan Perizinan

Semenjak Januari 2021, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung memiliki nomor layanan agar dapat melayani pelanggan dengan cepat, daring dan memudahkan konsultasi via aplikasi Whatsapp. Sehingga saat pandemi Covid 19 di bulan Maret yang mengharuskan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Jawa Barat, klien tetap dapat berkonsultasi melalui nomor tersebut.





2. Survey Kepuasan Pelanggan

Pada tahun 2018 Balai Monitor SFR Kelas I Bandung mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi ISO TUV Rheinland. Salah satu sasaran yang wajib dipenuhi adalah melakukan survey untuk menetapkan Indeks Kepuasan Pelanggan sesuai komitmen Balmon Bandung dari Pencapaian Sasaran Mutu terhadap layanan yang diberikan 80% (sasaran mutu, standar pelayanan) atau lebih.

Kegiatan Survey Kepuasan Pelanggan spektrum frekuensi radio melalui penyebaran angket terhadap masing-masing jenis pelanggan ke beberapa lokasi di wilayah Jawa Barat, adalah untuk mendapatkan model pengukuran kepuasan pelanggan, yang juga mencerminkan keberhasilan kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya maupun manajemen spektrum frekuensi radio pada khususnya.

Kepuasan pelanggan khususnya pengguna spektrum frekuensi radio merupakan salah satu tujuan penetapan sistem manajemen mutu yang harus dipantau secara terus menerus. Evaluasi, pengukuran parameter tingkat kepuasan pelanggan serta upaya menghilangkan penyebab ketidaksesuaian pada setiap tahapan merupakan komitmen dan indikator keberhasilan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung dalam meningkatkan sistem mutu yang sesuai dengan komitmen ISO. Yang lebih penting adalah saling keterkaitan hubungan timbal balik yang harmonis dan menguntungkan antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung dan pelanggan frekuensi radio khususnya di wilayah Jawa Barat dan dampak positif yang dihasilkan adalah peningkatan jumlah PNBPN dan meningkatnya jumlah pengguna frekuensi radio kedepannya. Diharapkan hasil dari Survey Kepuasan Pelanggan ini berhasil dan berdaya guna bagi peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Total responden yang berhasil dihimpun yaitu sebanyak 88 klien dari berbagai wilayah di Bandung, Garut, Cianjur Kuningan dan saat Bimbingan Teknis untuk anggota PRSSNI se-Jawa Barat.

Indeks Kepuasan Pelanggan 89.89 % DARI 118 RESPONDEN

Nilai tingkat kepuasan pelanggan paling besar yaitu Performansi Aparat. Mencakup kepercayaan terhadap kecakapan, pengetahuan, petugas dalam melayani, cepat tanggapnya petugas, kemampuan aparat dalam menjawab pertanyaan, keramahan aparat dalam melayani dan ketepatan pemenuhan janji baik di kantor maupun di lapangan. Nilai tingkat kepuasan pelanggan paling kecil yaitu Media Pelayanan mencakup fasilitas operator telepon, facsimile dan email.

BAB IV PENUTUP



Pada awal tahun 2021 Balmon SFR Kelas I Bandung mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 17.883.165.000 (tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan adanya penambahan untuk anggaran sosialisasi Maritime on the Spot dan revisi anggaran untuk penanganan Covid-19 serta penambahan anggaran belanja modal, maka Pagu Anggaran Balmon SFR Kelas I Bandung menjadi Rp. 20.897.051.000 (dua puluh milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh satu ribu rupiah)

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021, telah ditetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu yang pertama adalah Indikator Kinerja yang mendukung Sasaran Program Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi dan yang kedua merupakan Indikator Kinerja yang mendukung Sasaran Program Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfiredrad yang bersih,

efisien dan efektif. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2021, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah berhasil mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diemban. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran dengan hasil yang dicapai dalam hitungan rata-rata adalah melewati perkiraan target sasaran.

Seluruh Indikator Kinerja (IK) telah mampu menunjukkan Kinerja sesuai dengan target yang diharapkan. Dari 2 (dua) Indikator Kinerja yang mendukung Sasaran Program Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi mampu mencapai target lebih dari 100% dan Indikator Kinerja (IK) Sasaran Program Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang Bersih, Efisiensi dan Efektif) dari target IKPA score 86% capaian IKPA score Balmon Bandung mencapai 86,53% atau capainnya mencapai 102,94% dari target.

Pelaksanaan kegiatan yang masih mengalami kendala untuk mencapai target 100% adalah Pelaksanaan sosialisasi dan atau SRC/LRC dan jumlah ISR Maritim Nelayan. Faktor yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan implementasi dari kegiatan maritime on the spot adalah :

1. Jarak pelabuhan-pelabuhan yang jauh dari Kantor Balmon Bandung
2. Belum ada dasar hukum yang memberatkan.
3. Ekosistem frekuensi kemaritiman belum terbentuk.
4. Frekuensi maritim di kapal tidak bersifat private.
5. Perangkat radio di kapal ikan masih bersifat All Band

Sehingga banyak pengguna frekuensi maritime terutama kapal-kapal ikan yang kurang respon terhadap peraturan frekuensi kemaritiman. Dari kendala yang kami kemukakan tadi ada beberapa solusi yang dapat kami sampaikan untuk

bisa menjadi rekomendasi penyelesaian masalah implementasi dari sosialisasi dan atau SRC/LRC dan jumlah ISR Maritim Nelayan, yaitu :

1. Diadakannya frekuensi khusus nelayan
2. Penegakan hukum dan sanksi yang tegas
3. Diadakan sampling perangkat agar nelayan bisa melihat langsung contoh perangkatnya.

Pada akhirnya semoga laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung. Laporan ini diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap peningkatan kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung. Dengan demikian, laporan ini merupakan evaluasi kinerja dan dapat dimanfaatkan sebagai acuan perencanaan kegiatan, tugas dan fungsi di masa yang akan datang

DOKUMENTASI KEGIATAN BALMON SFR KELAS I BANDUNG



UNAR REGULER TAHUN 2021



BIMBINGAN TEKNIS CAT UNAR



sesuai arah jarum jam :

- Inspeksi Stasiun Radio Terkait Validasi Data
- Monitong dalam rangka target penertiban nasional
- Pengukuran bersama dengan Balmon Jakarta dan Banten dalam rangka pembuatan SOP TV Digital





**Pencegahan penyebaran Covid – 19 dengan penyuntikan vaksin
dan penyemprotan disinfektan**





